

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan, khususnya di masa pemerintahan Donald Trump yang pada 2025 mengeluarkan kebijakan pembatasan visa mahasiswa asing, termasuk dari Tiongkok, ke universitas-universitas terkemuka seperti Harvard. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya rivalitas akademik global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun penjelasan detail mengenai kebijakan ini akan dibahas pada bab selanjutnya, pemahaman mengenai konteks dan latar belakang kebijakan ini sangat penting sebagai pondasi untuk melihat bagaimana pendidikan tinggi menjadi arena pertarungan kekuasaan global.

#### **2.1 Mengapa Pendidikan Tinggi Merupakan Hal Penting?**

##### **2.1.1 Penjelasan Tentang Pendidikan Tinggi Sebagai Sumber Kekuatan Negara**

Di era modern saat ini, kekuatan suatu negara tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari kapasitasnya dalam membangun dan memanfaatkan pengetahuan. Pendidikan tinggi menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kekuatan negara karena dari pendidikan lahir para ilmuwan, teknolog, pemikir kebijakan, dan pemimpin masa depan. Universitas bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga pusat produksi ilmu pengetahuan dan inovasi yang dapat menentukan posisi suatu negara dalam percaturan global. Negara-negara besar di dunia berlomba membangun universitas unggulan, bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mencetak citra sebagai pusat peradaban. Negara yang mampu mengembangkan pendidikan tinggi yang kuat secara otomatis memiliki keunggulan dalam membentuk opini dunia, menetapkan standar ilmu, dan menanamkan pengaruhnya di berbagai bidang strategis, mulai dari teknologi hingga diplomasi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi menjadi alat penting dalam perebutan pengaruh global, atau yang sering disebut sebagai bentuk kekuasaan lunak (soft power).

Namun, kekuatan pendidikan tinggi tidak hanya terletak pada hasil riset atau inovasi teknologi yang dihasilkannya. Lebih dari itu, pendidikan tinggi juga mengandung dimensi simbolik yang sangat kuat. Gelar akademik, reputasi kampus, dan jaringan alumni sering kali menjadi alat untuk meningkatkan status sosial maupun posisi tawar di ranah internasional. Sawiński (1986) menjelaskan bahwa pendidikan, terutama pendidikan tinggi, memiliki nilai prestise tersendiri dalam tatanan sosial. Masyarakat memandang pendidikan bukan hanya sebagai jalan menuju pekerjaan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekuasaan. Pendidikan tinggi ditempatkan di puncak hierarki prestise sosial, melampaui bentuk pendidikan lain yang lebih rendah nilainya dalam struktur masyarakat. Dalam studi Sawiński di Polandia, ditemukan bahwa masyarakat menilai individu dengan pendidikan tinggi, terutama yang diselesaikan di universitas atau institusi setara, sebagai orang yang lebih berprestise dibandingkan lulusan pendidikan menengah atau dasar. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menciptakan pengakuan sosial yang melekat pada individu dan, secara lebih luas, pada institusi dan negara asalnya. Dengan kata lain, kualitas

dan akses terhadap pendidikan tinggi juga mencerminkan derajat pencapaian suatu bangsa di mata komunitas global.

Karena itulah, persaingan di bidang pendidikan tinggi menjadi sangat krusial. Negara-negara berinvestasi besar dalam sistem universitas mereka, baik melalui pendanaan penelitian, perekrutan akademisi top dunia, maupun promosi internasional. Mereka menyadari bahwa kampus-kampus unggulan adalah representasi dari keberhasilan nasional yang bisa dibanggakan. Di sisi lain, negara-negara berkembang juga berupaya keras membangun sistem pendidikan tinggi yang mampu bersaing agar tidak terus-menerus bergantung pada negara maju dalam hal ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi juga memberi negara kapasitas untuk mempengaruhi isu-isu global. Universitas yang produktif dalam riset kebijakan, sains, teknologi, hingga humaniora dapat membentuk narasi-narasi besar yang digunakan sebagai referensi di berbagai forum internasional. Maka dari itu, negara dengan institusi pendidikan tinggi yang kuat juga akan lebih dominan dalam menetapkan arah perkembangan dunia.

Selain aspek simbolik dan fungsional, pentingnya pendidikan tinggi juga terletak pada kemampuannya membentuk struktur sosial jangka panjang. Pendidikan tinggi tidak hanya memperbaiki mobilitas sosial individu, tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial yang mendukung stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, akses terhadap pendidikan tinggi sering kali menjadi persoalan politik yang sangat strategis. Sebagai kesimpulan dari poin ini, pendidikan tinggi bukan hanya persoalan akademik atau administratif, melainkan bagian dari strategi kekuasaan nasional. Negara-negara yang menguasai pendidikan

tinggi memiliki keuntungan besar dalam membentuk dunia, baik melalui penciptaan teknologi, pengaruh budaya, maupun pembentukan opini publik internasional. Itulah sebabnya pendidikan tinggi menjadi rebutan: karena di balik kampus, tersembunyi kekuasaan besar yang dapat menentukan siapa yang mengendalikan masa depan.

### **2.1.2 Hubungan Antara Kampus, Ilmu Pengetahuan, dan Kekuasaan**

Dalam dunia modern, kampus bukan hanya tempat orang belajar dan meneliti. Kampus juga adalah ruang kekuasaan tempat di mana ilmu pengetahuan tidak hanya diproduksi, tetapi juga dikendalikan, disebarkan, dan dijadikan alat untuk membentuk pengaruh. Ketika negara-negara ingin bersaing di tingkat global, mereka tidak hanya membangun pabrik dan angkatan militer, tapi juga membangun universitas-universitas unggulan. Ini menunjukkan bahwa kampus dan ilmu pengetahuan memiliki kedudukan sentral dalam konfigurasi kekuasaan internasional. Kampus memiliki peran unik sebagai “pabrik pengetahuan.” Di sanalah teknologi ditemukan, kebijakan publik dikaji, dan solusi global dirumuskan. Namun, tidak semua negara punya kapasitas yang sama untuk memproduksi dan menyebarkan ilmu. Hanya negara dengan infrastruktur pendidikan tinggi yang mapan dan kuat yang bisa menjadi pusat kekuasaan pengetahuan global. Dalam sistem seperti ini, pengetahuan bukan sesuatu yang netral, ia membawa nilai, ideologi, dan kepentingan dari tempat ia diproduksi. Artinya, ilmu yang dihasilkan di Harvard atau Oxford membawa bobot politik dan

budaya yang berbeda dibandingkan dengan yang dihasilkan di kampus yang tidak dikenal secara global.

Lo (2011) secara jelas menjelaskan bahwa universitas-universitas elite global tidak hanya menghasilkan ilmu, tetapi juga merepresentasikan kekuasaan kultural dan politik negara asalnya. Dalam sistem peringkat dan produksi pengetahuan internasional, universitas-universitas top menjadi simbol keunggulan peradaban dan alat dominasi global. Ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan menjadi standar yang diikuti oleh institusi lain di seluruh dunia, bahkan ketika standar itu mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk konteks lokal di negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam dunia akademik sangat terikat dengan tempat asal dan jaringan kekuasaan yang lebih besar. Kampus juga memainkan peran dalam membentuk siapa yang bisa bicara dan siapa yang didengar di tingkat global. Ketika jurnal-jurnal akademik top didominasi oleh penulis dari negara-negara maju, dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang juga berasal dari sana, maka terjadi proses “penyaringan” yang tidak netral. Ilmu dari negara-negara maju lebih sering dianggap kredibel, sedangkan pengetahuan dari dunia selatan (global south) sering kali dipinggirkan atau tidak dianggap universal. Ini adalah bentuk kekuasaan epistemik di mana pengaruh tidak datang dari senjata, tetapi dari siapa yang punya otoritas dalam menyatakan sesuatu sebagai “ilmu pengetahuan yang sah.”

Di sisi lain, kampus juga menjadi alat dalam strategi kebijakan luar negeri. Negara-negara seperti Amerika Serikat menjadikan universitas sebagai “agen diplomasi” dengan menerima mahasiswa internasional dari seluruh dunia. Mereka

tidak hanya mendapatkan pelatihan ilmiah, tetapi juga disosialisasikan dengan nilai-nilai dan ideologi tertentu. Ketika mereka pulang ke negara asal, alumni ini membawa tidak hanya ilmu, tapi juga cara berpikir dan jaringan yang mendukung dominasi budaya dan politik negara tempat mereka belajar. Hal ini memperkuat posisi negara tersebut dalam arsitektur global kekuasaan non-militer. Fakta bahwa universitas-universitas top dunia didominasi oleh institusi dari Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bagaimana kampus telah menjadi alat dalam mempertahankan kekuasaan global.

Yang menarik, kekuasaan yang dibangun lewat kampus tidak harus bersifat koersif. Ia bekerja melalui pengakuan dan prestise. Ketika seorang peneliti dari Asia diterima dan dipublikasikan oleh jurnal akademik Barat, hal itu dianggap sebagai pencapaian besar. Ketika sebuah universitas berhasil masuk dalam daftar 100 besar dunia, pemerintah dan masyarakatnya menganggapnya sebagai bukti keberhasilan nasional (Marginson, 2006). Di sinilah kekuasaan pengetahuan bekerja, tidak memaksa, tapi membuat pihak lain ingin diakui dalam sistem yang telah dibangun oleh kekuatan dominan (Gramsci, 1971). Penting juga dicatat bahwa tidak semua negara memiliki kekuatan yang sama untuk membangun institusi seperti ini. Dibutuhkan dana besar, sistem riset yang berkelanjutan, dan kebijakan nasional yang konsisten. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan kini Tiongkok, memiliki keunggulan ini. Sedangkan negara-negara berkembang sering kali masih berkutat pada soal akses dasar pendidikan. Ini memperlebar kesenjangan global dalam hal siapa yang bisa menjadi produsen dan pengguna utama pengetahuan (Altbach, 2007). Secara keseluruhan, hubungan antara kampus, ilmu

pengetahuan, dan kekuasaan sangat erat dan kompleks. Kampus bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat strategi nasional. Ilmu pengetahuan bukan hanya soal objektivitas, tetapi juga soal siapa yang punya otoritas untuk berbicara. Di sinilah hegemoni memainkan perannya, tidak dengan memaksakan kebenaran secara paksa, tetapi dengan menetapkan kerangka mana yang diakui sebagai wacana sah dalam komunitas ilmiah global. Dengan begitu, hegemoni bekerja melalui legitimasi dan institusionalisasi norma global di mana universitas-universitas elit berperan sebagai penjaga gerbang dunia epistemik (Lo, 2011).

## **2.2 Sejarah Awal Dominasi Akademik di Dunia**

### **2.2.1 Lahirnya Universitas di Eropa**

Universitas modern seperti yang kita kenal sekarang memiliki akar sejarah yang panjang. Di Eropa, lembaga pendidikan tinggi mulai muncul secara lebih sistematis pada abad ke-11 hingga ke-13. Kemunculan universitas pada masa ini bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari perkembangan sosial, politik, dan keagamaan yang berlangsung dalam waktu lama. Universitas lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pengetahuan terstruktur dan lembaga yang mampu memelihara, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu. Salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya universitas adalah pertumbuhan kota dan kebangkitan kembali aktivitas intelektual di Eropa setelah periode Abad Kegelapan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan pemerintahan kota, muncullah kebutuhan akan tenaga profesional yang terdidik, seperti ahli hukum, dokter, dan administrator gerejawi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, muncullah

pusat-pusat pembelajaran yang akhirnya berkembang menjadi universitas. Contohnya adalah Universitas Bologna di Italia yang dikenal sebagai pusat studi hukum, dan Universitas Paris yang menjadi pusat ilmu teologi dan filsafat .

Namun, universitas pada masa itu bukan hanya institusi akademik biasa. Ia juga berperan dalam sistem politik dan otoritas yang sedang berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Riddle (1993), universitas terbentuk melalui hubungan erat antara penguasa politik dan lembaga keagamaan. Otoritas gereja dan raja-raja di Eropa memiliki kepentingan dalam mengatur dan membina pusat-pusat pembelajaran ini, karena dari sanalah lahir generasi baru pemimpin gerejawi dan administratur negara. Dengan kata lain, universitas juga menjadi alat legitimasi kekuasaan dan pengaruh politik. Pada awalnya, universitas tidak didirikan dengan struktur yang rapi seperti sekarang. Mereka tumbuh dari sekolah-sekolah katedral atau sekolah kota yang secara bertahap menjadi lebih otonom. Di Bologna, mahasiswa membentuk asosiasi (universitas) mereka sendiri untuk melindungi kepentingan mereka terhadap kota dan pengajar. Sebaliknya, di Paris, struktur universitas lebih dipengaruhi oleh otoritas gereja. Variasi ini menunjukkan bahwa bentuk universitas sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial lokal masing-masing tempat .

Salah satu ciri khas universitas abad pertengahan adalah hak-hak istimewa yang mereka miliki. Otoritas gereja atau raja memberikan hak kepada universitas untuk mengatur urusan internal mereka sendiri, seperti memilih rektor, menentukan kurikulum, dan memberikan gelar akademik. Universitas juga seringkali memiliki perlindungan hukum khusus, termasuk kekebalan dari yurisdiksi pengadilan sipil.

Hak-hak ini menunjukkan bahwa universitas bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga aktor politik yang diakui dalam struktur sosial saat itu. Selain itu, kurikulum awal universitas Eropa sangat dipengaruhi oleh kebutuhan gereja dan pemerintahan. Mata pelajaran utama meliputi trivium (tata bahasa, logika, retorika) dan quadrivium (aritmatika, geometri, musik, astronomi), yang kemudian dilanjutkan dengan studi hukum, kedokteran, dan teologi. Struktur kurikulum ini dirancang untuk membentuk individu yang tidak hanya terpelajar, tetapi juga dapat mengisi posisi penting dalam lembaga gereja dan negara .

Penting untuk dicatat bahwa meskipun universitas awal merupakan produk dari Eropa Kristen, prinsip-prinsip dasar yang mereka anut kemudian menjadi fondasi bagi sistem pendidikan tinggi modern di berbagai belahan dunia. Hal-hal seperti kebebasan akademik, pengakuan gelar, dan struktur fakultas merupakan warisan dari periode ini. Bahkan sistem gelar seperti sarjana, magister, dan doktor yang kita kenal sekarang berasal dari struktur akademik universitas abad pertengahan. Dengan lahirnya universitas, ilmu pengetahuan mulai diposisikan sebagai institusi yang otonom, meskipun masih berada di bawah pengaruh gereja. Ini menjadi titik penting dalam sejarah Eropa karena menunjukkan pergeseran besar dalam cara masyarakat mengelola pengetahuan. Ilmu tidak lagi hanya diwariskan dalam komunitas-komunitas kecil atau lembaga keagamaan, tetapi mulai diorganisasi secara sistematis untuk dipelajari, diuji, dan disebarkan dalam skala yang lebih luas .

Secara keseluruhan, kelahiran universitas di Eropa pada abad ke-11 hingga ke-13 menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak pernah lepas dari konteks

kekuasaan dan kebutuhan sosial-politik. Universitas muncul bukan hanya karena kehausan akan ilmu, tetapi juga karena adanya kebutuhan akan sistem pelatihan elit yang dapat mendukung struktur kekuasaan yang sedang berkembang. Sejak awal, kampus telah menjadi bagian dari kekuatan sosial yang lebih besar bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk masa depan politik dan budaya suatu peradaban.

### **2.2.2 Pengaruh Model Pendidikan Tinggi Eropa Terhadap Dunia**

Setelah munculnya universitas-universitas awal di Eropa, seperti Bologna, Paris, dan Oxford, struktur pendidikan tinggi di benua ini mulai menginspirasi perkembangan sistem pendidikan di seluruh dunia. Model pendidikan tinggi Eropa, yang menggabungkan pengajaran sistematis, kurikulum yang tersentralisasi, serta struktur gelar akademik bertingkat, menjadi cetakan awal bagi banyak sistem universitas modern di berbagai negara. Pada masa kolonial dan pascakolonial, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang mengadopsi sistem pendidikan tinggi Eropa sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Model universitas Eropa dianggap unggul karena telah teruji dalam menghasilkan pengetahuan, melatih tenaga profesional, serta memperkuat kapasitas institusional negara. Institusi pendidikan tinggi tidak hanya dilihat sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai alat pembentuk elit nasional dan alat diplomasi budaya.

Menurut Brockliss (2000), universitas-universitas di Eropa tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas kota dan negara. Kota-kota Eropa yang memiliki universitas

bergengsi mendapatkan status sosial dan politik yang lebih tinggi dibanding kota lain. Universitas menjadi simbol keunggulan budaya dan keilmuan, serta memperkuat peran kota dalam jaringan pengetahuan internasional. Citra inilah yang kemudian ditiru oleh banyak negara lain ketika mereka mulai membentuk sistem universitasnya sendiri. Sebagai contoh, banyak negara jajahan Eropa mendirikan universitas berdasarkan struktur akademik Barat, baik dalam hal kurikulum, gelar, maupun organisasi fakultas. Bahkan setelah kemerdekaan, banyak negara mempertahankan struktur tersebut karena dianggap kompatibel dengan sistem birokrasi modern dan memberikan pengakuan internasional. Dalam hal ini, model universitas Eropa tidak hanya menyebarkan metode pengajaran, tetapi juga nilai-nilai sosial-politik seperti meritokrasi, profesionalisme, dan rasionalitas institusional.

Dalam konteks globalisasi pendidikan saat ini, model universitas Eropa juga menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi lintas negara. Reisz dan Stock (2012) menunjukkan bahwa banyak negara kini berlomba-lomba untuk menyesuaikan sistem universitas mereka agar sesuai dengan standar internasional, seperti sistem Bologna di Eropa atau sistem tiga jenjang (sarjana, magister, doktor). Adopsi model ini tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga sistem akreditasi, mobilitas akademik, hingga indikator peringkat universitas global. Pengaruh ini juga terlihat dalam bagaimana universitas-universitas baru dirancang. Di banyak negara berkembang, universitas elite dibangun dengan tujuan untuk masuk ke dalam jaringan universitas global yang mengikuti logika Barat. Bahasa pengantar yang digunakan sering kali adalah bahasa Inggris, struktur fakultas

mengikuti model Barat, dan bahkan arsitektur kampus meniru gaya universitas-universitas ternama Eropa. Hal ini mencerminkan aspirasi negara-negara tersebut untuk menjadi bagian dari komunitas keilmuan internasional yang didominasi oleh standar Eropa dan Amerika.

Namun, penyebaran model pendidikan Eropa juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan antara sistem lokal dengan struktur universitas asing yang diimpor. Beberapa negara mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem ini dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi domestik. Di sisi lain, ada pula kritik bahwa model universitas Eropa membawa agenda terselubung berupa westernisasi nilai dan cara berpikir. Institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi sarana pembebasan pengetahuan justru dianggap menjadi alat reproduksi nilai-nilai dominan global yang mengesampingkan kearifan lokal. Meskipun begitu, tidak dapat disangkal bahwa model pendidikan tinggi Eropa telah menciptakan standar global yang diakui dan diikuti oleh banyak pihak. Dalam era kompetisi akademik internasional seperti sekarang, universitas yang ingin bersaing di tingkat global hampir tidak memiliki pilihan selain mengadopsi standar yang sudah mapan. Hal ini memperkuat dominasi Eropa (dan Amerika) dalam menetapkan arah dan wajah pendidikan tinggi global.

Secara historis, kekuatan model pendidikan tinggi Eropa bukan hanya berasal dari kualitas kurikulumnya, tetapi juga dari kemampuannya beradaptasi dan menciptakan jejaring pengetahuan. Universitas Eropa sejak awal memiliki hubungan dengan kerajaan, gereja, dan elit intelektual, yang memperkuat posisinya dalam struktur sosial dan politik. Ketika model ini menyebar ke negara lain, ia

membawa serta logika kekuasaan yang sama bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan universitas adalah penjaganya. Sebagai penutup, pengaruh model universitas Eropa terhadap dunia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis. Universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simbol peradaban, alat kekuasaan, dan medium diplomasi internasional. Dalam konteks ini, keberhasilan model pendidikan tinggi Eropa bukan hanya dilihat dari kemampuannya menyebar, tetapi dari kemampuannya membentuk cara dunia memandang pengetahuan, otoritas akademik, dan kemajuan peradaban.

### **2.2.3 Awal Mula Penyebaran Ilmu Sebagai Kekuatan Global**

Sejak pertama kali ilmu pengetahuan mulai dipelajari secara sistematis di universitas, pengetahuan telah menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memengaruhi cara berpikir masyarakat, tetapi juga arah peradaban dunia. Dari Eropa abad pertengahan, ilmu perlahan-lahan menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai medium: perdagangan, kolonialisme, pertukaran ilmiah, hingga perkembangan teknologi informasi. Ilmu pengetahuan tidak lagi hanya menjadi alat untuk memahami dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk mengubahnya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, terutama sejak abad ke-19, mulai dilihat bukan hanya sebagai warisan budaya tetapi sebagai sumber daya strategis. Negara-negara berlomba-lomba membangun sistem pendidikan tinggi dan pusat riset yang mampu menghasilkan pengetahuan baru. Tujuannya bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi membangun daya saing nasional. Di sinilah ilmu mulai menjelma menjadi

instrumen kekuasaan. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan akan unggul dalam teknologi, ekonomi, militer, bahkan diplomasi budaya.

Ogilvy (1981) menjelaskan bahwa penyebaran pengetahuan merupakan bagian dari proses evolusi sosial. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dan disebarluaskan melalui pendidikan, masyarakat tidak hanya menjadi lebih terdidik tetapi juga lebih kompleks secara sosial dan politik. Ilmu membawa konsekuensi: ia menuntut struktur masyarakat yang mampu menghargai kebebasan berpikir, rasionalitas, dan inovasi. Oleh karena itu, negara-negara yang berhasil memfasilitasi pendidikan tinggi dan riset sering kali menjadi pemimpin peradaban. Penting untuk dipahami bahwa penyebaran ilmu tidak bersifat netral. Ketika ilmu dibawa dari satu wilayah ke wilayah lain, ia juga membawa nilai-nilai dan sistem berpikir tertentu. Universitas, sebagai pusat pengembangan ilmu, turut menanamkan pandangan dunia yang sering kali mencerminkan asal-usul geografis dan ideologis institusinya. Maka, penyebaran pengetahuan juga merupakan bentuk penyebaran kekuasaan budaya sesuatu yang kini sering disebut sebagai *soft power*. Dalam hal ini, kampus menjadi salah satu aktor terkuat dalam diplomasi global.

Proses globalisasi turut mempercepat penyebaran ilmu dan menjadikannya kekuatan transnasional. Teknologi informasi, kerjasama riset internasional, dan mobilitas akademik telah memungkinkan pertukaran pengetahuan secara cepat dan luas. Namun, dalam banyak kasus, arus pengetahuan masih bergerak secara tidak seimbang: negara-negara Barat tetap menjadi pusat produksi ilmu, sementara negara-negara lain menjadi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ilmu bersifat universal, sistem produksinya tetap bergantung pada kekuatan ekonomi dan

infrastruktur pendidikan yang kuat. Penting juga dicatat bahwa penyebaran ilmu pengetahuan berperan besar dalam transformasi global. Banyak revolusi besar dalam sejarah manusia mulai dari revolusi industri, penemuan antibiotik, hingga era digital semuanya berakar dari pengembangan ilmu. Ini menegaskan bahwa kekuatan sejati dari ilmu bukan hanya pada pengetahuannya itu sendiri, tetapi pada kemampuan ilmu untuk menciptakan perubahan nyata dalam dunia sosial, ekonomi, dan politik.

Universitas dan institusi pendidikan tinggi memainkan peran utama dalam proses ini. Mereka bukan hanya tempat belajar, melainkan pusat pengolahan pengetahuan, eksperimen, dan inovasi. Bahkan, dalam konteks kontemporer, universitas juga menjadi simbol kemajuan dan modernitas sebuah negara. Negara-negara yang memiliki universitas unggulan biasanya dipandang lebih maju, dan hal ini mendorong banyak negara untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu pilar strategi pembangunan nasional mereka. Kekuatan ilmu juga terlihat dari bagaimana negara-negara menggunakan sistem pendidikan tinggi untuk membangun citra global mereka. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah lama menggunakan universitas sebagai jendela diplomasi. Mahasiswa internasional yang belajar di universitas mereka tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga membawa pulang citra dan nilai-nilai budaya negara tersebut. Maka, pendidikan tinggi tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk persepsi dan hubungan antarbangsa.

Seiring waktu, penyebaran ilmu semakin memperkuat peran pendidikan sebagai kekuatan strategis global. Ilmu menjadi alat untuk memengaruhi,

membentuk opini, dan mendominasi wacana dunia. Dalam kondisi seperti ini, pertarungan global tidak lagi hanya terjadi di medan perang atau pasar internasional, tetapi juga di kampus-kampus dan laboratorium riset. Negara-negara tidak hanya berebut sumber daya alam, tetapi juga berebut kecerdasan dan ide. Dengan demikian, penyebaran ilmu sebagai kekuatan global adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam sejarah modern. Ilmu tidak lagi sekadar sarana pencapaian pribadi, melainkan bagian integral dari kekuatan negara. Universitas, sebagai jantung dari pengembangan ilmu, kini berada di tengah pusaran kekuasaan global. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif, penguasaan ilmu berarti penguasaan masa depan.

## **2.3 Lompatan Amerika Serikat: Dari Pemula Jadi Pemimpin**

### **2.3.1 Perang Dunia II dan Lonjakan Riset di AS**

Perang Dunia II menjadi titik balik besar dalam sejarah pendidikan tinggi dan riset di Amerika Serikat. Sebelum perang, universitas di AS lebih dikenal sebagai lembaga pengajaran tradisional. Namun, situasi berubah drastis ketika kebutuhan militer dan industri mendorong keterlibatan aktif dunia akademik dalam mendukung upaya perang. Pemerintah Amerika menyadari bahwa sains dan teknologi akan memainkan peran penting dalam memenangkan konflik global tersebut. Selama perang, universitas-universitas Amerika mulai bermitra langsung dengan pemerintah federal dalam proyek-proyek riset strategis. Salah satu contoh paling terkenal adalah Proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom sebuah proyek yang melibatkan para ilmuwan terkemuka dari universitas seperti Berkeley

dan Chicago. Keberhasilan proyek-proyek seperti ini menjadikan universitas sebagai pusat kekuatan nasional dalam pengembangan teknologi dan inovasi.

John Higham dalam tulisannya menyebut bahwa munculnya peran universitas sebagai pusat produksi pengetahuan adalah bagian dari transformasi intelektual yang lebih luas dalam sejarah Amerika. Setelah Perang Dunia II, universitas bukan hanya tempat mengajar, tetapi juga dianggap sebagai "mesin nasional" untuk menghasilkan inovasi dan solusi atas tantangan zaman. Inilah awal mula terbentuknya budaya riset yang sangat kuat di dalam kampus-kampus elite Amerika. Fenomena lonjakan riset pasca perang juga disebabkan oleh meningkatnya anggaran dari pemerintah federal. Lembaga-lembaga seperti National Science Foundation (NSF) dan Office of Naval Research memberikan dana besar untuk riset universitas. Selain itu, militer juga memperkuat hubungannya dengan universitas dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan teknologi informasi. Negara sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah alat utama dalam persaingan global, terutama saat Perang Dingin mulai berkembang.

Tak hanya sains keras, ilmu sosial dan humaniora pun berkembang pesat. Pemerintah dan lembaga riset mulai tertarik pada pemahaman budaya, perilaku manusia, dan kebijakan publik untuk mendukung strategi nasional. Maka, riset tidak hanya untuk inovasi teknologi, tapi juga alat untuk memahami dan mengelola masyarakat. Universitas-universitas besar seperti Harvard, MIT, dan Stanford mulai memosisikan diri sebagai institusi riset kelas dunia. Mereka tidak lagi hanya mencetak lulusan, tetapi juga berperan aktif dalam memecahkan masalah global. Dalam banyak hal, universitas menjadi ruang pertarungan ide dan kebijakan.

Negara menggantungkan banyak harapan pada dunia akademik untuk memberikan pengetahuan strategis.

Menurut Higham, kondisi ini turut menciptakan lapisan baru dalam dunia intelektual Amerika: para ilmuwan bukan hanya sebagai akademisi, tetapi sebagai agen perubahan nasional. Mereka ikut menentukan arah kebijakan, mendesain sistem pertahanan, hingga mempengaruhi diplomasi luar negeri. Artinya, riset universitas tidak lagi netralia masuk ke wilayah politik dan kepentingan negara. Momentum pascaperang juga memperkuat struktur riset berbasis institusi. Banyak laboratorium riset, pusat studi, dan lembaga kajian dibentuk dalam kampus, menciptakan ekosistem riset yang kompleks. Mahasiswa pascasarjana mendapat peran penting sebagai tenaga riset, dan proses pendidikan menjadi sangat terintegrasi dengan aktivitas penelitian.

Lebih dari itu, keberhasilan Amerika dalam mengembangkan teknologi militer dan medis selama perang memperkuat keyakinan bahwa pendidikan tinggi adalah investasi strategis. Maka, negara mulai merumuskan kebijakan jangka panjang untuk mendukung pendidikan tinggi melalui program seperti GI Bill, yang memungkinkan jutaan veteran perang mengakses universitas. Hal ini secara tidak langsung memperluas basis intelektual nasional dan memperkuat fondasi riset untuk masa depan. Dalam kesimpulan Higham, lonjakan riset di Amerika pasca-Perang Dunia II bukan hanya perubahan institusional, tetapi juga perubahan paradigma. Universitas berubah dari lembaga konservatif menjadi pusat inovasi progresif. Perubahan ini membawa dampak besar dalam perkembangan intelektual Amerika dan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya, bukan

hanya secara militer tetapi juga secara intelektual dan ilmiah. Dengan demikian, Perang Dunia II menjadi momen yang menandai lahirnya wajah baru universitas di Amerika: modern, kuat secara riset, dan sangat terhubung dengan kepentingan negara. Sejak saat itu, pendidikan tinggi tidak hanya tentang pengajaran dan pencarian ilmu, tetapi juga tentang kekuasaan, pengaruh global, dan strategi nasional.

### **2.3.2 Peran Negara dalam Membiayai Universitas dan Teknologi**

Pasca Perang Dunia II, peran negara dalam sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat mengalami perubahan besar. Pemerintah tidak lagi memosisikan universitas hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran bahwa riset akademik memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi Amerika dalam persaingan global, terutama menghadapi Uni Soviet selama Perang Dingin. Negara mulai aktif berinvestasi dalam universitas dan lembaga riset melalui program-program pendanaan besar-besaran. Pemerintah federal mendirikan dan memperkuat institusi seperti National Science Foundation (NSF) dan memberikan dana riset langsung ke universitas. Tujuannya bukan hanya untuk memajukan pengetahuan, tetapi juga untuk mendukung keamanan nasional dan kepentingan luar negeri. Ini menandai lahirnya era baru di mana negara menjadi aktor utama dalam menentukan arah riset akademik.

Tsvetkova (2008) menunjukkan bahwa keterlibatan negara Amerika dalam mendanai dan mengarahkan pendidikan tinggi selama Perang Dingin sebenarnya

merupakan strategi sosial dan politik. Negara menyadari bahwa membangun universitas kuat dan menarik mahasiswa asing merupakan bagian dari diplomasi dan pengaruh global. Oleh karena itu, pemerintah mendukung universitas tidak hanya secara finansial, tetapi juga melalui regulasi dan kerangka kebijakan yang mendorong internasionalisasi dan ekspansi institusional. Salah satu bentuk dukungan negara adalah menyediakan dana riset bagi fakultas dan mahasiswa yang fokus pada bidang strategis seperti fisika nuklir, teknologi roket, ilmu komputer, dan bahasa asing. Bidang-bidang ini dianggap penting dalam mendukung posisi Amerika di kancah global. Riset-riset ini sering kali diarahkan untuk mendukung kebijakan luar negeri atau kebutuhan pertahanan. Artinya, universitas tidak hanya bekerja demi sains, tetapi juga demi agenda negara.

Dukungan finansial yang besar ini membuat universitas mampu membangun laboratorium riset mutakhir, menarik ilmuwan terkemuka, dan membentuk komunitas akademik yang kuat. Dalam jangka panjang, hal ini menjadikan universitas sebagai pusat keunggulan yang tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga dalam inovasi industri, militer, dan teknologi sipil. Universitas berubah menjadi mesin produktivitas pengetahuan yang didanai dan diarahkan oleh negara. Selain pendanaan, negara juga mendorong universitas untuk menjalin kolaborasi dengan sektor industri. Model triple helix kerjasama antara pemerintah, universitas, dan swasta menjadi strategi dominan dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Negara memberikan insentif pajak, subsidi, dan perlindungan kekayaan intelektual agar hasil riset universitas dapat dikomersialkan

dan memperkuat industri nasional. Dalam konteks ini, riset akademik berubah dari yang semula bersifat murni menjadi sangat aplikatif dan strategis.

Penting dicatat bahwa intervensi negara juga berdampak pada struktur kelembagaan universitas. Untuk mengelola dana riset dan proyek nasional, universitas mulai membentuk kantor riset dan administrasi proyek yang besar. Akademisi didorong untuk menulis proposal, mengelola dana, dan memenuhi target riset yang kadang lebih sesuai dengan kebutuhan negara daripada keingintahuan ilmiah. Hal ini memunculkan tantangan baru: bagaimana menjaga independensi akademik dalam struktur yang sangat bergantung pada dana publik. Namun di sisi lain, peran negara juga membuka peluang besar bagi ekspansi dan internasionalisasi. Dengan dukungan negara, universitas Amerika membuka program untuk mahasiswa asing, memperluas jaringan riset internasional, dan membangun reputasi global. Mahasiswa dari negara-negara berkembang yang belajar di Amerika tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membawa nilai-nilai Amerika ke negara asalnya. Inilah bentuk kekuatan lunak (*soft power*) yang ditanamkan melalui pendidikan tinggi.

Tsvetkova juga menyoroti bahwa selama Perang Dingin, pendidikan tinggi Amerika menjadi alat untuk mempertahankan status quo sosial. Melalui kontrol terhadap kurikulum, bahasa pengantar, dan distribusi dana, negara memastikan bahwa universitas tidak menyimpang dari nilai-nilai dominan seperti kapitalisme, demokrasi liberal, dan nasionalisme Amerika. Maka, pendidikan tidak hanya membentuk keahlian teknis, tetapi juga membentuk ideologi. Di akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an, mulai muncul kritik terhadap dominasi negara dalam

pendidikan tinggi. Gerakan mahasiswa dan akademisi mempertanyakan keterlibatan militer, konflik kepentingan dengan industri, serta hilangnya otonomi ilmiah. Namun, fondasi dari hubungan kuat antara negara dan universitas sudah terlanjur terbentuk dan terus bertahan hingga sekarang. Dengan demikian, negara memainkan peran sangat sentral dalam membentuk ekosistem pendidikan tinggi Amerika yang unggul di bidang riset dan teknologi. Tanpa dukungan negara, universitas-universitas besar di AS tidak akan bisa berkembang menjadi pusat inovasi dan pengaruh global seperti sekarang. Intervensi negara menjadikan universitas sebagai aktor strategis dalam politik dan ekonomi global, serta memperkuat posisi Amerika sebagai kekuatan utama dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **2.3.3 Lahirnya Kampus Riset Seperti Harvard, MIT, dan Stanford**

Sejak pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat menyaksikan transformasi besar dalam dunia pendidikan tinggi. Universitas-universitas tertentu, seperti Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan Stanford, berkembang dari institusi pendidikan biasa menjadi pusat riset kelas dunia. Transformasi ini bukan sekadar pertumbuhan fisik atau peningkatan jumlah mahasiswa, melainkan perubahan mendasar dalam visi, misi, dan peran universitas dalam masyarakat. Jonathan Cole dalam tulisannya menggambarkan bagaimana universitas-universitas ini berhasil mengukuhkan posisi mereka sebagai "universitas besar Amerika" yang tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi menjadi pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan kebijakan strategis. Mereka menempatkan riset

sebagai inti dari kegiatan akademik, menggabungkan pencarian ilmu murni dengan penerapan praktis yang memberi dampak nyata bagi bangsa dan dunia.

Perkembangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Harvard, misalnya, sejak awal sudah memiliki kekuatan finansial yang besar melalui endowment dan jaringan alumni yang luas. Tapi faktor utama pendorong transformasinya adalah komitmen terhadap riset ilmiah dan kebijakan negara yang mendorong kolaborasi antara universitas dan pemerintah. MIT dan Stanford mengikuti jejak serupa, dengan membangun reputasi dalam bidang teknik, ilmu komputer, dan sains terapan. Mereka membuka pusat riset, menjalin hubungan dengan sektor industri, dan berperan aktif dalam proyek-proyek nasional, mulai dari pertahanan hingga antariksa. Universitas riset ini juga mengembangkan budaya akademik yang berfokus pada publikasi ilmiah, kompetisi ide, dan kolaborasi multidisipliner. Mereka menarik dosen dan mahasiswa terbaik dari seluruh dunia, menciptakan lingkungan intelektual yang mendorong kreativitas dan inovasi. Di sinilah lahir banyak penemuan besar yang membentuk kehidupan modern mulai dari internet, GPS, hingga vaksin dan teknologi medis.

Kehebatan universitas seperti Harvard, MIT, dan Stanford tidak hanya diukur dari fasilitas atau jumlah dana yang mereka miliki, tetapi dari komitmen terhadap kebebasan akademik, meritokrasi, dan semangat kolaborasi. Ketiga prinsip ini membuat universitas-universitas tersebut menjadi pusat gravitasi intelektual dunia. Mereka juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik, menjadi mitra pemerintah dalam berbagai proyek strategis, dan berkontribusi besar dalam perekonomian melalui spin-off dan paten. Kehadiran

kampus riset semacam ini membawa pengaruh besar dalam peta kekuasaan akademik global. Amerika menjadi tujuan utama mahasiswa dan peneliti internasional, terutama dari negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga alat diplomasi dan pengaruh global. Negara-negara lain mulai meniru model universitas riset Amerika, meskipun tidak semua berhasil mereplikasi sistem tersebut.

Stanford menjadi contoh menarik dalam kaitannya dengan hubungan antara universitas, industri, dan inovasi. Dengan berada di jantung Silicon Valley, Stanford tidak hanya mendidik mahasiswa, tetapi juga menciptakan perusahaan-perusahaan teknologi yang mengubah dunia seperti Google, Hewlett-Packard, dan Yahoo. MIT juga memiliki rekam jejak serupa dengan kontribusi besar terhadap teknologi pertahanan dan ruang angkasa Amerika. Harvard, meskipun lebih dikenal sebagai kampus humaniora, juga aktif dalam bidang kesehatan, hukum, dan kebijakan publik. Kunci dari keberhasilan model universitas riset ini adalah dukungan yang stabil dari pemerintah dan sektor swasta. Dalam beberapa dekade terakhir, kolaborasi antara universitas dan pemerintah semakin erat. Banyak penelitian yang dilakukan di kampus didanai oleh lembaga pemerintah seperti National Institutes of Health (NIH) dan National Science Foundation (NSF). Pendanaan ini memungkinkan universitas untuk menjelajahi bidang-bidang baru tanpa tekanan pasar langsung, sehingga memberi ruang lebih besar untuk riset dasar yang sangat penting namun tidak selalu menghasilkan keuntungan langsung.

Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan tantangan baru. Ketergantungan pada dana pemerintah dan industri bisa mengancam independensi

akademik jika tidak diawasi dengan baik. Selain itu, tekanan untuk selalu unggul dalam publikasi dan paten dapat menciptakan budaya kompetitif yang ekstrem dan tidak selalu sehat. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara kebebasan ilmiah dan tuntutan eksternal menjadi kunci keberlanjutan universitas riset. Dengan demikian, lahirnya kampus riset seperti Harvard, MIT, dan Stanford merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor: visi akademik yang kuat, dukungan negara, kolaborasi dengan industri, dan komitmen terhadap inovasi. Ketiga universitas ini bukan hanya simbol keberhasilan pendidikan tinggi Amerika, tetapi juga pilar utama dalam mempertahankan posisi hegemonik Amerika Serikat di panggung akademik global.

## **2.4 Korelasi Bahasa dan Dominasi Akademik**

### **2.4.1 Bahasa Sebagai Alat Dominasi Akademik**

Dalam dunia pendidikan tinggi internasional, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan. Di antara semua bahasa yang digunakan dalam akademik, bahasa Inggris mendominasi secara mutlak. Hampir semua jurnal ilmiah bereputasi, konferensi internasional, serta program pascasarjana elit di seluruh dunia menjadikan bahasa Inggris sebagai syarat utama. Bahkan, banyak negara non-Inggris yang secara strategis mulai menggunakan bahasa ini dalam sistem pendidikan mereka agar dapat bersaing di panggung global. Menurut Altbach, dominasi bahasa Inggris tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari pengaruh politik, ekonomi, dan budaya negara-negara penutur bahasa Inggris, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini telah lama

mendominasi dalam hal pendanaan riset, publikasi ilmiah, dan peringkat universitas dunia. Universitas-universitas seperti Harvard, Oxford, dan MIT menjadi pusat gravitasi akademik yang tak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga menjadi simbol otoritas global .

Akibat dominasi ini, peneliti dari negara lain harus beradaptasi agar dapat diterima dalam komunitas ilmiah internasional. Mereka harus menulis dalam bahasa Inggris dan mengikuti standar akademik Barat, yang kadang tidak sesuai dengan konteks lokal mereka. Bagi peneliti yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bahasa Inggris, hal ini menjadi tantangan besar. Tidak hanya butuh usaha ekstra dalam menulis, mereka juga menghadapi hambatan dalam memahami literatur dan berinteraksi dalam diskusi akademik global. Bahasa Inggris juga menjadi penentu prestise akademik. Banyak universitas di negara-negara non-Inggris mendorong dosen dan mahasiswanya untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal internasional berbahasa Inggris demi meningkatkan reputasi institusi. Semakin banyak publikasi dalam jurnal-jurnal tersebut, semakin tinggi pula peringkat universitas mereka. Akibatnya, bahasa lokal semakin terpinggirkan dari arena ilmiah. Bahkan penelitian yang sangat relevan dengan kondisi lokal sering kali diabaikan hanya karena tidak ditulis dalam bahasa yang "diakui" secara global.

Situasi ini memperkuat ketimpangan dalam produksi dan distribusi ilmu pengetahuan. Negara-negara maju, yang secara historis telah menguasai pusat-pusat riset dan lembaga penerbitan, semakin mendominasi dalam menentukan arah dan topik riset global. Mereka tidak hanya menguasai isi dari pengetahuan yang

beredar, tetapi juga menentukan cara pengetahuan itu disampaikan dan dinilai. Dalam hal ini, bahasa Inggris bukan hanya alat, tetapi juga pagar pembatas yang menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam arena akademik elit. Altbach juga mencatat bahwa dalam banyak kasus, penggunaan bahasa Inggris bukan semata untuk kenyamanan, tetapi strategi sadar dari negara atau institusi pendidikan. Misalnya, universitas di negara-negara seperti Singapura, Belanda, dan Uni Emirat Arab kini membuka program-program penuh dalam bahasa Inggris untuk menarik mahasiswa asing dan mendapatkan pengakuan global. Dengan cara ini, mereka mencoba masuk ke dalam sistem pendidikan global yang berpusat pada standar Anglo-Saxon .

Namun, konsekuensi dari strategi ini tidak selalu positif. Ketergantungan yang terlalu besar pada bahasa Inggris dapat menggerus keberagaman bahasa dan budaya dalam dunia akademik. Pengetahuan lokal yang sebelumnya berkembang dalam bahasa ibu menjadi terlupakan atau tidak terdokumentasikan secara luas. Selain itu, tekanan untuk selalu menulis dalam bahasa asing menciptakan kesenjangan antara akademisi yang memiliki akses terhadap pelatihan bahasa dan mereka yang tidak. Dalam jangka panjang, dominasi bahasa Inggris menciptakan sistem akademik global yang tersentralisasi dan eksklusif. Hanya mereka yang memiliki kemampuan bahasa tinggi dan akses ke institusi elit yang dapat bersuara dan didengar. Ini menghambat lahirnya perspektif alternatif, terutama dari negara-negara berkembang, yang sebenarnya memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman unik yang bisa memperkaya diskursus global.

Meskipun penggunaan bahasa bersama dapat memfasilitasi kolaborasi internasional dan penyebaran pengetahuan yang lebih cepat, penting untuk diingat bahwa bahasa juga membawa nilai-nilai dan cara pandang tertentu. Ketika satu bahasa mendominasi, maka nilai-nilai dan pandangan dari budaya asal bahasa tersebut juga ikut mendominasi. Dalam konteks ini, dominasi bahasa Inggris mencerminkan dan memperkuat dominasi budaya serta politik dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran bahasa sebagai alat kekuasaan sangat penting dalam studi tentang pendidikan tinggi global. Dengan memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk struktur otoritas dan distribusi pengetahuan, kita bisa mulai merancang sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua pelaku akademik, tanpa memandang latar belakang bahasa mereka.

#### **2.4.2 Negara-negara Non-Inggris Harus Menyesuaikan Diri Untuk Diakui Global**

Dalam lanskap pendidikan tinggi global, negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama menghadapi tantangan besar agar bisa diakui di kancah internasional. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa dominan dalam komunikasi ilmiah, publikasi akademik, dan sistem penilaian prestasi universitas dunia. Akibatnya, negara-negara non-Inggris harus menyesuaikan diri dengan standar, bahasa, dan sistem yang ditentukan oleh negara-negara berbahasa Inggris, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Adaptasi ini tidak hanya sekadar memilih bahasa pengantar untuk pengajaran atau publikasi, tetapi juga mencakup perubahan besar dalam budaya akademik dan struktur

kelembagaan. Banyak universitas di negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jerman, Prancis, dan Indonesia mulai membuka program studi internasional dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk menarik mahasiswa asing dan meningkatkan daya saing universitas mereka di peringkat global. Namun, konsekuensinya, bahasa lokal semakin tersingkir dari ruang akademik formal, dan topik-topik riset yang berfokus pada isu-isu lokal sering kali dianggap kurang relevan jika tidak dipublikasikan dalam bahasa Inggris.

Penyesuaian ini juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam dunia akademik global. Negara-negara berbahasa Inggris memiliki keunggulan struktural karena mereka menguasai pusat-pusat publikasi ilmiah dan jurnal bereputasi tinggi. Banyak jurnal ilmiah internasional terbit di negara-negara Barat dan menggunakan standar editorial yang selaras dengan tradisi akademik Anglo-Saxon. Hal ini membuat akademisi dari negara non-Inggris harus mengubah gaya menulis, pendekatan riset, dan bahkan memilih topik yang dianggap “universal” sering kali berarti sesuai dengan minat pembaca Barat agar dapat diterima untuk publikasi. Tantangan lain muncul dalam proses penerbitan. Banyak akademisi dari negara berkembang menghadapi kendala bahasa, biaya publikasi, dan kurangnya akses terhadap bimbingan editorial yang memadai. Bahkan jika kualitas penelitiannya tinggi, karya mereka bisa saja ditolak hanya karena kekurangan dalam tata bahasa atau penggunaan istilah yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional. Ketika kemampuan berbahasa menjadi penghalang untuk publikasi, maka ilmu pengetahuan menjadi tidak inklusif dan cenderung didominasi oleh suara dari negara maju.

McKeon (1958) dalam refleksinya tentang “bahasa kekuasaan” menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tertentu dalam konteks sosial bukanlah sesuatu yang netral, tetapi sarat dengan kepentingan politik dan ideologis. Dalam dunia akademik, dominasi bahasa Inggris juga merefleksikan kontrol terhadap apa yang dianggap valid, penting, dan ilmiah. Negara-negara non-Inggris yang ingin diakui secara global tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan struktur yang sudah terbentuk, bahkan jika itu berarti menanggalkan sebagian dari identitas dan pendekatan lokal mereka terhadap ilmu pengetahuan. Adaptasi yang dilakukan juga sering kali dimotivasi oleh tekanan dari lembaga-lembaga internasional. Peringkat universitas dunia seperti QS dan Times Higher Education memberikan bobot besar terhadap indikator internasionalisasi, termasuk jumlah publikasi berbahasa Inggris, jumlah dosen dan mahasiswa asing, serta kolaborasi global. Universitas-universitas di negara berkembang pun mulai mengejar metrik ini agar bisa naik peringkat dan mendapatkan pengakuan internasional. Dalam proses ini, mereka mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan pusat penulisan akademik berbahasa Inggris, memfasilitasi pelatihan bahasa untuk dosen, dan mendorong riset yang berorientasi internasional.

Namun, langkah-langkah ini juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, universitas ingin memperluas jangkauan global mereka. Di sisi lain, mereka berisiko mengabaikan misi sosial dan kebutuhan lokal. Ketika dosen dan mahasiswa terlalu fokus pada publikasi internasional, mereka bisa saja kehilangan koneksi dengan komunitas lokal dan mengabaikan persoalan-persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Penelitian yang relevan secara lokal tapi

ditulis dalam bahasa ibu sering kali tidak mendapat pengakuan atau dianggap tidak berdampak secara global. Sebagai respons terhadap tekanan ini, beberapa negara mulai merumuskan kebijakan yang lebih seimbang. Misalnya, beberapa universitas di Asia Timur mendorong sistem publikasi bilingual, di mana peneliti dapat menulis dalam bahasa lokal untuk jurnal nasional dan dalam bahasa Inggris untuk jurnal internasional. Di Eropa, kebijakan multilingualisme mulai diterapkan untuk mempertahankan keberagaman budaya dalam dunia akademik. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap sistem global tidak harus berarti menyerah pada hegemoni tunggal, tetapi bisa menjadi proses negosiasi yang lebih adil.

Namun demikian, selama pusat kekuasaan dalam sistem akademik global masih terletak di negara-negara berbahasa Inggris, adaptasi ini akan tetap berlanjut. Negara-negara non-Inggris harus terus mencari strategi untuk memperkuat posisi mereka, baik dengan meningkatkan kapasitas bahasa Inggris akademik maupun membangun jaringan dan jurnal internasional alternatif. Upaya kolektif ini diperlukan agar sistem ilmu pengetahuan global menjadi lebih seimbang dan merepresentasikan keragaman pandangan dan konteks dari seluruh dunia.

#### **2.4.3 Bahasa dan Publikasi Sebagai Instrumen Kekuasaan**

Dalam dunia akademik global, kekuasaan tidak hanya tampak dalam bentuk ekonomi atau teknologi, tetapi juga dalam bentuk yang lebih halus yakni penguasaan terhadap bahasa dan sistem publikasi ilmiah. Bahasa dan publikasi telah menjadi alat penting dalam menentukan siapa yang bisa dianggap

“berpengetahuan” dan siapa yang hanya menjadi penerima informasi. Dalam konteks ini, bahasa Inggris bukan sekadar media komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi simbol legitimasi keilmuan. Menurut Altbach, penguasaan terhadap publikasi ilmiah berbahasa Inggris memberi keuntungan besar bagi negara-negara Barat. Mereka bukan hanya menjadi pusat pengetahuan, tapi juga pemilik sistem distribusi pengetahuan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris mendominasi penerbitan jurnal ternama, badan akreditasi ilmiah, dan lembaga pemeringkatan pendidikan tinggi dunia. Dominasi ini menciptakan semacam “ekosistem eksklusif”, di mana publikasi berbahasa Inggris dianggap lebih bergengsi dan berpengaruh daripada tulisan dalam bahasa lain.

Sebagai akibatnya, akademisi dari negara-negara non-Inggris harus bekerja dua kali lebih keras. Tidak cukup hanya dengan melakukan riset yang bermutu, mereka juga harus mampu menyampaikan gagasan mereka dalam bahasa Inggris akademik yang kompleks dan memenuhi standar editorial yang ketat. Banyak dari mereka bahkan harus menyewa jasa penerjemah atau editor profesional untuk memastikan tulisan mereka dapat diterima di jurnal internasional. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena hanya akademisi yang memiliki sumber daya yang cukup yang mampu berkompetisi di level global. McKeon menekankan bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk menentukan cara berpikir dan menyusun realitas. Dalam hal ini, dominasi bahasa Inggris dalam dunia akademik membentuk kerangka berpikir ilmiah yang bersifat Barat. Artinya, standar keilmuan global sering kali ditentukan oleh nilai-nilai, pendekatan, dan logika berpikir negara-negara berbahasa Inggris. Akibatnya, pendekatan riset yang lebih kontekstual,

lokal, atau tradisional bisa jadi terpinggirkan karena tidak sesuai dengan “standar global” yang ditentukan oleh sistem publikasi ilmiah berbahasa Inggris.

Kekuasaan melalui publikasi juga tampak dalam sistem penilaian akademik. Karier seorang dosen atau peneliti kini sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas publikasi mereka di jurnal internasional berbahasa Inggris. Banyak universitas dan lembaga riset menetapkan publikasi di jurnal Scopus atau Web of Science sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, promosi, bahkan perpanjangan kontrak. Dalam sistem ini, publikasi ilmiah bukan lagi semata alat berbagi pengetahuan, tetapi berubah menjadi “mata uang kekuasaan” yang menentukan siapa yang dihormati, didengar, dan dipercaya. Lebih dari itu, publikasi ilmiah juga menjadi alat seleksi dalam dunia akademik global. Siapa yang mendapat ruang untuk berbicara di konferensi bergengsi, siapa yang dijadikan rujukan, bahkan siapa yang dapat mengakses dana penelitian, semuanya bergantung pada rekam jejak publikasi. Ketika publikasi ilmiah didominasi oleh satu bahasa, maka kesempatan untuk berpartisipasi secara setara juga otomatis menjadi tidak adil. Akademisi dari negara-negara yang tidak menguasai bahasa Inggris tertinggal, bukan karena kualitas intelektual mereka lebih rendah, tetapi karena sistemnya tidak memberi mereka tempat yang sama.

Yang menarik, fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada lembaga dan negara. Universitas yang memiliki banyak publikasi di jurnal internasional akan lebih mudah memperoleh peringkat tinggi dan dukungan dana. Negara yang institusi pendidikannya diakui secara global juga lebih berpengaruh dalam membentuk arah kebijakan pendidikan internasional. Dengan demikian,

publikasi ilmiah menjadi alat diplomasi lunak (soft power) yang sangat kuat. Ia memungkinkan negara atau lembaga untuk memperluas pengaruh mereka tanpa harus menggunakan kekuatan militer atau ekonomi. Namun, sistem ini juga membawa risiko. Ketika publikasi ilmiah terlalu difokuskan pada jurnal-jurnal elit berbahasa Inggris, maka keragaman epistemik dan budaya menjadi terancam. Ilmu pengetahuan menjadi terlalu homogen, terlalu barat, dan terlalu terpusat. Banyak perspektif alternatif, terutama dari Global South, tidak mendapat tempat yang layak. Padahal, pengalaman dan kearifan lokal dari berbagai belahan dunia bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas cara pandang kita terhadap berbagai masalah global.

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem publikasi yang lebih inklusif. Ini bisa dimulai dengan memperkuat jurnal-jurnal lokal yang menggunakan bahasa ibu namun tetap menjaga standar kualitas tinggi. Lembaga akademik juga bisa mulai mengakui bentuk-bentuk publikasi lain seperti laporan kebijakan, artikel populer, atau karya berbasis komunitas sebagai bagian dari kontribusi akademik. Pendekatan seperti ini tidak hanya akan memperluas akses terhadap publikasi, tetapi juga mengurangi dominasi satu bahasa atas yang lain. Singkatnya, bahasa dan publikasi dalam dunia akademik telah menjadi instrumen kekuasaan yang sangat efektif. Mereka tidak hanya menentukan siapa yang bisa berbicara, tetapi juga siapa yang bisa diakui. Untuk menciptakan dunia akademik yang lebih adil, perlu upaya bersama untuk mendekonstruksi sistem ini dan membangun mekanisme yang lebih setara dan representatif.

## **2.5 Sistem Pendidikan Tinggi AS yang Membentuk Hegemoni**

### **2.5.1 Keunggulan Fasilitas, Kurikulum, dan Kebebasan Berpikir**

Salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat berhasil memimpin dalam pendidikan tinggi dunia adalah karena kekuatan sistem pendidikannya yang sudah dibangun sejak lama. Kampus-kampus besar seperti Harvard, MIT, dan Stanford bukan sekadar tempat kuliah, tetapi juga menjadi pusat inovasi, pengembangan teknologi, dan pemikiran bebas. Di dalam lingkungan kampus Amerika, mahasiswa diajak untuk tidak hanya menghafal, tetapi berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, bahkan menantang pandangan yang sudah mapan. Hal ini menjadi salah satu ciri khas pendidikan tinggi Amerika yang membuatnya berbeda dari sistem pendidikan lain di dunia. Dalam sejarahnya, sistem pendidikan Amerika dirancang bukan hanya untuk melahirkan lulusan terampil, tetapi juga warga negara yang mampu berpikir mandiri dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Di banyak kampus, budaya diskusi, debat terbuka, dan kebebasan intelektual sangat dijaga. Mahasiswa diberi ruang untuk bertanya, meragukan, dan mencari jawaban melalui proses ilmiah dan pengalaman pribadi. Filosofi pendidikan ini menekankan pentingnya berpikir bebas sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang sehat secara politik dan sosial (Tyack, 2000: 19).

Salah satu keunggulan sistem pendidikan tinggi di Amerika adalah fleksibilitas kurikulumnya. Mahasiswa tidak harus langsung memilih jurusan sejak awal masuk kuliah. Sebaliknya, mereka diberikan waktu dan ruang untuk mencoba berbagai bidang studi dan menentukan jalur akademiknya sendiri. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat menggabungkan minat dari berbagai disiplin ilmu misalnya

menggabungkan studi komputer dengan desain, atau biologi dengan kebijakan publik. Kebebasan memilih ini memungkinkan mereka untuk menemukan kekuatan dan minatnya sendiri, serta mendorong kreativitas dan keterampilan lintas bidang. Tidak hanya dari segi kurikulum, fasilitas yang dimiliki oleh universitas-universitas di Amerika juga sangat maju. Laboratorium riset dilengkapi dengan teknologi terkini, perpustakaan menyediakan jutaan koleksi sumber daya, dan kampus memiliki lingkungan yang mendukung kolaborasi antar mahasiswa, dosen, dan peneliti. Bahkan banyak kampus memiliki pusat inkubasi bisnis, klinik konsultasi hukum, atau studio seni yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmunya dalam dunia nyata.

Ciri penting lain dari sistem pendidikan tinggi Amerika adalah kuatnya budaya riset dan inovasi. Banyak dosen yang tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif dalam riset dan pengembangan ilmu. Kampus tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat penciptaan pengetahuan. Dengan dana riset yang besar dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga donor, mahasiswa pun diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek penelitian yang relevan dengan isu dunia nyata. Kebebasan berpikir yang kuat dalam pendidikan tinggi Amerika juga menjadi salah satu daya tarik bagi mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Di negara-negara dengan sistem pendidikan yang lebih kaku atau terkekang oleh sensor politik, kampus Amerika menawarkan suasana yang terbuka. Di sini, mahasiswa dapat menyuarakan pendapat, menulis makalah yang kritis terhadap kekuasaan, atau bahkan mengorganisasi aksi sosial tanpa takut dibungkam. Tyack menyebutkan bahwa kebebasan semacam ini telah menjadi tradisi penting dalam

sejarah pendidikan Amerika, dan menjadi elemen pembeda dari sistem pendidikan di negara lain (Tyack, 2000: 20). Pemerintah Amerika juga memberikan dukungan besar terhadap sistem pendidikan tinggi, terutama dalam bentuk dana riset, beasiswa, dan kebijakan yang mendukung pengembangan akademik. Selain itu, kontribusi dari alumni dan filantropi swasta juga membuat banyak kampus di AS mampu membangun fasilitas kelas dunia. Kombinasi antara pendanaan publik dan partisipasi swasta ini memperkuat infrastruktur akademik yang sulit ditandingi oleh negara lain.

Meski demikian, Tyack mengingatkan bahwa sistem pendidikan tinggi Amerika tetap menghadapi tantangan, salah satunya adalah ketimpangan akses. Biaya pendidikan yang sangat tinggi di beberapa kampus ternama menjadi hambatan bagi banyak kalangan, terutama mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah (Tyack, 2000: 20). Meskipun banyak kampus menawarkan bantuan keuangan, kenyataannya tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan peluang yang sama. Namun secara keseluruhan, keunggulan sistem pendidikan tinggi di Amerika Dari fleksibilitas kurikulum, kekayaan fasilitas, hingga budaya kebebasan intelektual menjadikan negara ini sebagai pusat pendidikan dan riset global. Mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, menjadikan Amerika sebagai destinasi utama untuk mengejar pendidikan tinggi karena mereka melihat adanya kesempatan untuk berkembang secara akademik, intelektual, dan profesional di lingkungan yang mendukung kreativitas dan kebebasan berpikir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keunggulan pendidikan tinggi Amerika tidak hanya dibentuk oleh faktor ekonomi atau kekuatan politik, tetapi juga oleh nilai-nilai dasar

dalam sistem pendidikannya. Nilai-nilai inilah yang menjadikan kampus-kampus di AS sebagai tempat lahirnya ide-ide baru, teknologi masa depan, dan pemimpin global.

### **2.5.2 Beasiswa Internasional**

Salah satu kekuatan utama Amerika Serikat dalam mempertahankan dominasinya di bidang pendidikan tinggi global adalah melalui pemberian beasiswa internasional. Program-program seperti Fulbright menjadi alat strategis untuk menarik mahasiswa dan peneliti terbaik dari seluruh dunia agar datang ke Amerika. Beasiswa semacam ini bukan hanya sekadar bantuan dana pendidikan, tetapi merupakan bagian dari strategi soft power yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang dan menyebarkan nilai-nilai Amerika ke seluruh dunia. Fulbright adalah contoh paling terkenal dari beasiswa internasional Amerika. Program ini dimulai sejak 1946 dan telah mengirim serta menerima ratusan ribu mahasiswa dan akademisi dari berbagai negara. Melalui program ini, mahasiswa asing diberi kesempatan untuk belajar di kampus-kampus terbaik di Amerika Serikat. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga terpapar pada budaya, sistem politik, dan nilai-nilai demokrasi Amerika. Ketika mereka kembali ke negara asalnya, mereka sering menjadi elite intelektual, pemimpin, atau pembuat kebijakan, yang sudah terhubung secara emosional dan intelektual dengan Amerika.

Beasiswa seperti Fulbright juga merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam hubungan internasional. Ketika para alumni program ini kembali ke

negaranya, mereka membawa serta pengalaman positif tentang sistem pendidikan dan masyarakat Amerika. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat, sekaligus memperluas pengaruh budaya dan politik AS secara halus. Zakaria menyebut strategi ini sebagai bagian dari wajah baru hegemoni Amerika, yang tidak lagi mengandalkan kekuatan militer semata, tetapi juga membentuk jaringan pengaruh melalui pendidikan dan pertukaran budaya (Zakaria, 1998: 21). Bagi Amerika Serikat, program semacam ini juga memperkaya atmosfer akademik domestik. Dengan hadirnya mahasiswa dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara pesaing seperti Tiongkok, kampus-kampus di Amerika menjadi ruang pertemuan antarbudaya. Mahasiswa asing membawa perspektif baru, memperluas diskusi akademik, dan mendorong kerjasama riset lintas negara. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat posisi universitas-universitas Amerika sebagai pusat pengetahuan global.

Namun, penting juga disadari bahwa program beasiswa internasional seperti Fulbright bukanlah proyek filantropi belaka. Di balik niat baik dan tujuan pendidikan, terdapat perhitungan strategis yang matang. Amerika memahami bahwa salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan hegemoninya adalah dengan menciptakan generasi pemimpin di seluruh dunia yang “dekat” dengan cara berpikir, nilai, dan kepentingan AS. Pendidikan menjadi alat penting untuk membentuk elite global yang lebih bersahabat dengan Amerika dan lebih terbuka terhadap kerjasama strategis di masa depan. Tidak hanya Fulbright, Amerika juga menyediakan banyak program beasiswa lain melalui lembaga pemerintah seperti USAID, Department of State, maupun lembaga swasta seperti Ford Foundation,

Rockefeller Foundation, dan universitas itu sendiri. Program-program ini sering ditujukan untuk negara-negara berkembang atau wilayah strategis secara geopolitik. Tujuannya tetap sama: menciptakan hubungan baik dan memperluas pengaruh Amerika melalui jalur pendidikan.

Di tengah meningkatnya persaingan global, terutama dengan Tiongkok, strategi ini semakin relevan. Tiongkok juga mulai menawarkan beasiswa internasional dan memperkuat kerja sama akademik dengan negara lain. Namun, Amerika tetap unggul karena jaringan universitasnya lebih kuat, sistem pendidikannya lebih terbuka, dan beasiswa seperti Fulbright memiliki reputasi yang sudah terbangun sejak lama. Dalam konteks ini, pemberian beasiswa menjadi arena persaingan hegemoni, di mana negara yang mampu menarik lebih banyak talenta global akan lebih unggul dalam pengaruh jangka panjang. Zakaria menjelaskan bahwa hegemoni modern tidak hanya dilihat dari kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dari kemampuan sebuah negara membentuk norma global dan menjadi pusat aspirasi. Dalam hal ini, sistem pendidikan dan beasiswa internasional Amerika memainkan peran penting dalam menjaga posisi hegemoniknya. Dengan menjadi tujuan utama pendidikan tinggi dunia, Amerika menciptakan jaringan pengaruh yang halus, tetapi sangat efektif (Zakaria, 1998: 22).

Selain itu, pemberian beasiswa juga memiliki nilai simbolik. Ia menunjukkan bahwa Amerika adalah negara terbuka, inklusif, dan bersedia berbagi kesempatan dengan dunia. Ini menjadi kontras dengan narasi negara tertutup atau nasionalistik yang membatasi masuknya mahasiswa asing. Dalam dunia yang semakin terhubung, citra ini sangat penting untuk menjaga legitimasi moral

Amerika sebagai pemimpin global. Meskipun demikian, beberapa kebijakan politik, seperti pembatasan visa di era pemerintahan tertentu, sempat mengganggu citra tersebut. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat, banyak calon mahasiswa dan peneliti merasa tidak diterima dan mulai melirik negara lain seperti Kanada, Australia, atau Eropa. Oleh karena itu, kesinambungan dan konsistensi kebijakan pendidikan luar negeri menjadi kunci dalam mempertahankan posisi dominan Amerika. Secara keseluruhan, beasiswa internasional seperti Fulbright bukan hanya tentang mendanai pendidikan. Ia adalah bagian dari strategi hegemoni yang cerdas. Dengan membuka pintu bagi mahasiswa terbaik dunia, Amerika tidak hanya memperkuat reputasi akademiknya, tetapi juga menanam benih pengaruh yang akan tumbuh dalam bentuk relasi diplomatik, kerjasama ekonomi, dan kemitraan strategis di masa depan.

### **2.5.3 Mahasiswa Asing Tertarik, AS Menjadi Magnet Talenta Global**

Amerika Serikat telah lama menjadi magnet utama bagi mahasiswa dari seluruh dunia yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Setiap tahun, ratusan ribu mahasiswa internasional datang ke berbagai universitas di AS, dari universitas riset top seperti Harvard dan MIT, hingga community college di daerah-daerah. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kualitas pendidikan tinggi Amerika, tetapi juga mencerminkan daya tarik budaya, politik, dan ekonomi negara tersebut secara global. Salah satu alasan utama mengapa mahasiswa asing memilih Amerika adalah karena reputasi akademiknya yang sangat tinggi. Banyak universitas di AS secara konsisten berada di peringkat atas dalam pemeringkatan global. Selain fasilitas

yang lengkap dan teknologi yang canggih, sistem pendidikan di Amerika dikenal memberikan kebebasan akademik yang luas. Mahasiswa tidak hanya belajar dari dosen, tetapi juga dilatih untuk berpikir mandiri, kreatif, dan kritis. Lingkungan ini sangat ideal bagi siapa pun yang ingin mengembangkan potensi intelektualnya.

Tak kalah penting adalah dukungan finansial dan peluang riset. Banyak kampus di Amerika menyediakan beasiswa penuh atau parsial bagi mahasiswa asing yang berprestasi. Di samping itu, kampus-kampus juga sering mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek penelitian mutakhir, baik di bidang sains, teknologi, kebijakan publik, hingga seni. Dengan pengalaman semacam ini, mahasiswa asing tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang langsung bisa diterapkan di dunia profesional. Lingkungan sosial dan budaya juga menjadi faktor yang memengaruhi. Amerika dikenal sebagai negara yang sangat beragam, dengan komunitas internasional yang besar dan aktif. Di banyak kampus, mahasiswa asing tidak merasa terasing karena mereka bisa menemukan komunitas sebangsanya, atau bahkan mendirikan organisasi budaya mereka sendiri. Hal ini membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah dan membuat pengalaman belajar di AS terasa lebih inklusif.

Namun, daya tarik Amerika tidak hanya berhenti pada aspek akademik. Bagi banyak mahasiswa asing, belajar di Amerika adalah langkah strategis untuk membuka jalan menuju karier internasional. Gelar dari universitas di AS sering kali dianggap lebih prestisius dan memiliki nilai jual tinggi di pasar kerja global. Lulusan dari universitas ternama Amerika juga lebih mudah diterima di perusahaan multinasional, organisasi internasional, atau bahkan sebagai pemimpin di negara

asal mereka. Underwood menjelaskan bahwa di Amerika, pendidikan bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan pribadi, tetapi sebagai bagian dari hak dan identitas nasional. Konsep “pendidikan sebagai hak” menjadikan sistem pendidikan tinggi AS sebagai salah satu yang paling terbuka bagi siapa saja yang mau belajar, termasuk dari luar negeri (Underwood, 2018: 76). Dengan demikian, sistem pendidikan Amerika tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam negeri, tetapi juga menjadi alat diplomasi global yang kuat.

Menariknya, tren mahasiswa asing di Amerika bukan hal baru. Sejak akhir Perang Dunia II, pemerintah AS telah secara aktif mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari strategi luar negerinya. Mahasiswa yang datang dari berbagai negara dianggap sebagai “duta intelektual” yang akan membawa kembali pengalaman dan nilai-nilai Amerika ke tanah air mereka. Dalam jangka panjang, ini menciptakan jaringan alumni global yang dapat memperkuat hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, dan pengaruh budaya Amerika. Namun, perlu dicatat bahwa menjadi magnet talenta global juga membawa tanggung jawab besar. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi visa, memperketat aturan imigrasi, atau menciptakan ketidakpastian bagi mahasiswa asing, maka daya tarik itu bisa menurun drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada masa pemerintahan tertentu, kebijakan visa yang ketat membuat banyak mahasiswa internasional mempertimbangkan negara alternatif seperti Kanada, Inggris, atau Australia.

Amerika Serikat juga harus menjaga keseimbangan antara nasionalisme dan keterbukaan. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang keamanan nasional, terutama

terkait isu-isu sensitif seperti teknologi dan data. Namun di sisi lain, jika terlalu banyak pembatasan, maka AS akan kehilangan banyak talenta potensial yang justru bisa membantu memperkuat daya saingnya di tingkat global. Daya tarik Amerika sebagai destinasi pendidikan global juga tidak bisa dilepaskan dari simbolisme “American Dream”. Banyak mahasiswa asing melihat pendidikan di AS sebagai langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa di Amerika, kerja keras dan prestasi akan dihargai tanpa memandang asal-usul atau status sosial. Gagasan ini menciptakan harapan dan mendorong banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk mencoba peruntungan melalui jalur pendidikan.

Terakhir, peran alumni juga sangat signifikan dalam menjaga daya tarik ini. Alumni dari universitas-universitas Amerika sering kembali ke negara mereka dengan cerita-cerita positif, koneksi profesional, dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Mereka menjadi “duta informal” yang terus mempromosikan AS sebagai tempat belajar terbaik, bahkan tanpa diminta. Dalam banyak kasus, keputusan generasi berikutnya untuk belajar di AS sering dipengaruhi oleh pengalaman sukses para alumni ini. Singkatnya, status Amerika sebagai magnet talenta global tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dibangun dari kombinasi kualitas akademik, keterbukaan budaya, dukungan finansial, dan nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam sistem pendidikannya. Jika semua aspek ini terus dijaga, maka Amerika akan tetap menjadi tujuan utama bagi mahasiswa dari seluruh dunia yang ingin belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi masa depan global.

## **2.6 Sistem Ranking Global**

### **2.6.1 Siapa yang Menentukan Kampus Terbaik?**

Ketika seseorang bertanya “kampus mana yang terbaik di dunia?”, jawaban yang muncul seringkali didasarkan pada hasil pemeringkatan universitas global seperti QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), dan Academic Ranking of World Universities (ARWU) atau Shanghai Ranking. Lembaga-lembaga inilah yang kini menjadi penentu tidak resmi dalam memutuskan kualitas dan prestise sebuah perguruan tinggi di mata dunia. Pemeringkatan global universitas muncul sebagai respons terhadap globalisasi pendidikan tinggi dan meningkatnya mobilitas mahasiswa internasional. Dengan banyaknya pilihan universitas lintas negara, mahasiswa, dosen, dan bahkan pembuat kebijakan memerlukan tolok ukur yang bisa membantu mereka menilai mutu sebuah institusi. Maka, muncul sistem pemeringkatan yang menyusun daftar kampus terbaik dunia berdasarkan sejumlah indikator.

QS dan THE dikenal sebagai lembaga berbasis media dan riset yang memiliki pendekatan berbasis reputasi akademik, reputasi pengusaha (employer reputation), sitasi penelitian, dan rasio mahasiswa internasional. Di sisi lain, ARWU lebih menitikberatkan pada pencapaian riset, seperti jumlah peraih Nobel atau publikasi di jurnal bergengsi. Meskipun ketiganya memiliki metodologi yang berbeda, hasilnya sering kali saling memperkuat dan menciptakan konsensus bahwa universitas-universitas tertentu seperti Harvard, MIT, Stanford, dan Oxford memang pantas menduduki peringkat atas. Namun, siapa sebenarnya yang berwenang menentukan “kampus terbaik”? Apakah indikator-indikator yang

digunakan benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan? Ataukah pemeringkatan ini lebih mencerminkan nilai-nilai tertentu yang berasal dari Barat, khususnya Amerika dan Eropa? Kehm menjelaskan bahwa ranking universitas merupakan produk budaya dan politik dari pendidikan tinggi global. Sistem peringkat bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga menciptakan realitas baru tentang apa itu “unggul” atau “berkelas dunia”. Dalam proses ini, universitas yang memenuhi kriteria dominan misalnya bahasa Inggris, banyak publikasi, dan riset eksperimental akan lebih mudah naik peringkat, sementara kampus di negara berkembang atau yang memiliki pendekatan berbeda akan tertinggal, meskipun berprestasi secara lokal (Kehm, 2014).

Indikator-indikator dalam pemeringkatan ini sering kali lebih menguntungkan universitas besar di negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Bahasa pengantar utama dalam publikasi akademik adalah bahasa Inggris, sehingga kampus berbahasa non-Inggris sering kali tidak terlihat. Selain itu, kriteria seperti jumlah publikasi di jurnal bereputasi cenderung mengabaikan kontribusi akademik yang bersifat lokal, kontekstual, atau berbasis pengabdian masyarakat. Akibatnya, universitas-universitas di Asia, Afrika, dan Amerika Latin kerap mengalami dilema. Di satu sisi, mereka ingin diakui secara global dengan mengikuti standar ranking internasional. Di sisi lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya akademik yang belum tentu sesuai dengan konteks lokal mereka. Beberapa negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan bahkan telah menyesuaikan kebijakan pendidikan tingginya agar universitas mereka bisa naik peringkat di QS atau THE. Ranking universitas juga memiliki efek domino terhadap

kebijakan nasional dan institusional. Banyak pemerintah mengalokasikan anggaran berdasarkan kinerja ranking. Universitas pun mulai fokus pada kegiatan yang bisa meningkatkan posisi mereka, seperti mendorong publikasi internasional, menjalin kolaborasi riset, dan menarik mahasiswa asing. Di sisi lain, aspek-aspek seperti kesejahteraan mahasiswa, pengabdian masyarakat, atau pendekatan pedagogi inovatif kerap terabaikan karena tidak diperhitungkan dalam sistem ranking. Lebih lanjut, Kehm mengkritisi bahwa sistem pemeringkatan ini bisa menciptakan tekanan sosial di dalam institusi akademik. Dosen dan peneliti terdorong untuk terus mengejar kuantitas publikasi daripada kualitas pembelajaran. Kompetisi antar universitas menjadi semakin tajam, dan solidaritas akademik global bergeser menjadi pertarungan reputasi. Dalam konteks ini, ranking bukan sekadar alat informasi, tetapi telah menjadi alat kekuasaan yang bisa menentukan nasib sebuah universitas secara global (Kehm, 2014).

Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pemeringkatan universitas telah menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam dunia pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa dan orang tua menjadikan ranking sebagai rujukan utama dalam memilih kampus. Bahkan, universitas yang berada di peringkat atas cenderung lebih mudah mendapatkan mitra internasional, dana hibah, dan mahasiswa unggulan. Sistem ranking ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong persaingan sehat, mendorong inovasi, dan memberikan insentif untuk terus berkembang. Di sisi lain, ia juga dapat menciptakan ketimpangan baru, tekanan yang tidak sehat, dan homogenisasi sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Karena itu, penting untuk menyadari bahwa “kampus terbaik” tidak selalu berarti “paling cocok untuk

semua orang.” Kualitas pendidikan tidak hanya bisa diukur dari jumlah publikasi atau peringkat internasional, tetapi juga dari dampak sosial, relevansi lokal, dan kenyamanan mahasiswa dalam belajar. Ke depan, dunia akademik mungkin perlu menciptakan sistem evaluasi yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual, agar semua kampus bisa berkembang sesuai kekuatannya masing-masing.

### **2.6.2 Universitas Top Dunia Didominasi AS**

Dalam daftar universitas terbaik dunia yang disusun oleh lembaga-lembaga seperti QS, THE, dan ARWU, nama-nama institusi asal Amerika Serikat selalu mendominasi peringkat teratas. Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Yale, dan Columbia menjadi contoh kampus yang nyaris tidak pernah absen dari sepuluh besar dunia. Dominasi ini bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari proses panjang pembangunan institusi pendidikan yang kuat, sistem pendanaan yang mapan, serta strategi branding dan penilaian kinerja yang dirancang untuk unggul di panggung global. Sejak pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat memang telah berinvestasi besar dalam pendidikan tinggi, terutama setelah Perang Dunia II. Pemerintah federal, swasta, dan lembaga filantropi secara aktif membiayai riset, pembangunan kampus, dan pengembangan tenaga akademik. Hasilnya adalah kemunculan sistem universitas riset yang sangat produktif dan berpengaruh. Universitas-universitas di AS bukan hanya tempat belajar, tetapi juga mesin pencetak ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang menopang kekuatan nasional.

Dalam konteks pemeringkatan, indikator yang digunakan oleh lembaga-lembaga seperti QS dan ARWU cenderung selaras dengan keunggulan yang sudah dimiliki oleh universitas di Amerika. Misalnya, jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, perolehan penghargaan Nobel, serta dampak riset secara global adalah aspek yang sejak lama menjadi keunggulan institusi-institusi pendidikan tinggi AS. Hal ini membuat mereka hampir selalu unggul secara struktural dibandingkan kampus-kampus dari negara berkembang yang belum memiliki tradisi riset yang kuat atau akses pendanaan yang besar. Menurut Drew dan Karpf, metode penilaian departemen akademik yang banyak digunakan dalam sistem ranking sangat menguntungkan institusi besar di Amerika. Mereka menyoroti bahwa evaluasi semacam ini sering kali menekankan reputasi dan persepsi komunitas akademik, bukan semata kualitas objektif atau hasil pembelajaran mahasiswa. Artinya, kampus-kampus ternama akan terus mendapat penilaian tinggi karena sudah dianggap unggul secara historis dan kultural, meskipun perubahan signifikan belum tentu terjadi setiap tahun (Drew & Karpf, 1981).

Hal ini menciptakan semacam “lingkaran prestise” yang sulit ditembus. Universitas-universitas top memiliki sumber daya lebih besar untuk merekrut dosen terbaik, membiayai riset kelas dunia, dan menarik mahasiswa paling berprestasi. Akibatnya, performa mereka terus tinggi, dan mereka pun kembali menduduki peringkat atas. Sebaliknya, universitas di luar kelompok elite akan kesulitan naik peringkat meskipun mengalami peningkatan signifikan karena terkendala dalam aspek reputasi dan sumber daya. Faktor bahasa juga tidak bisa diabaikan. Karena

sebagian besar jurnal ilmiah internasional menggunakan bahasa Inggris, institusi yang berbasis di negara berbahasa Inggris memiliki keuntungan besar dalam hal visibilitas dan dampak riset. Hal ini membuat universitas di AS, Inggris, dan Australia lebih terlihat dalam peta akademik global. Di sisi lain, riset-riset berkualitas dari universitas di Asia, Afrika, atau Amerika Latin yang ditulis dalam bahasa lokal sering kali tidak diperhitungkan dalam ranking global.

Dominasi AS dalam daftar peringkat universitas juga didukung oleh jaringan alumni global, kerja sama internasional, serta kekuatan ekonomi dan politik negara itu secara keseluruhan. Mahasiswa dari seluruh dunia bercita-cita untuk belajar di Amerika karena akses terhadap teknologi canggih, kualitas dosen, dan kesempatan kerja yang luas. Dengan menjadi pusat gravitasi talenta global, kampus-kampus AS semakin memperkuat dominasinya dalam pendidikan tinggi internasional. Namun, dominasi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah keunggulan Amerika dalam peringkat universitas berarti kualitas pendidikannya secara keseluruhan lebih baik, ataukah sistem penilaian itu sendiri yang dibentuk berdasarkan standar Amerika? Ini menjadi penting karena standar yang digunakan untuk mengevaluasi universitas seharusnya tidak hanya mempertimbangkan performa riset, tetapi juga relevansi sosial, keadilan akses pendidikan, dan keberagaman pendekatan pembelajaran.

Drew dan Karpf mencatat bahwa pemeringkatan tidak lepas dari bias struktural dan nilai-nilai tertentu yang memengaruhi cara kita melihat kualitas akademik. Ketika kita terlalu bergantung pada ranking, kita bisa kehilangan keragaman pendekatan pendidikan dan menegaskan kembali hierarki yang sudah

ada (Drew & Karpf, 1981). Akibatnya, kampus-kampus besar terus berjaya, sementara institusi kecil atau alternatif sering kali terpinggirkan dari narasi global. Kesimpulannya, dominasi universitas-universitas Amerika dalam sistem pemeringkatan global adalah hasil dari kombinasi antara keunggulan historis, struktur penilaian yang menguntungkan, serta kekuatan politik dan ekonomi negara tersebut. Meskipun patut diakui banyak kampus AS memang memiliki kualitas tinggi, penting untuk memahami bahwa ranking bukanlah cerminan mutlak kualitas pendidikan. Dunia akademik global perlu menyeimbangkan antara pengakuan terhadap institusi elite dan pemberdayaan terhadap kampus lain yang memiliki pendekatan berbeda namun tidak kalah bermakna.

### **2.6.3 Harvard Sebagai “Mahkota” Sistem Akademik Amerika**

Dalam dunia pendidikan tinggi global, tidak ada simbol yang lebih kuat daripada nama Harvard. Universitas ini bukan hanya institusi pendidikan, melainkan lambang kekuasaan akademik, prestise intelektual, dan dominasi budaya Amerika dalam sistem pendidikan global. Harvard telah berhasil mempertahankan citranya sebagai universitas terbaik dunia selama puluhan tahun, dan keberadaannya secara langsung memperkuat posisi hegemonik Amerika Serikat dalam dunia ilmu pengetahuan dan pengetahuan global. Peringkat universitas dunia seperti QS, THE (Times Higher Education), dan ARWU (Academic Ranking of World Universities) secara konsisten menempatkan Harvard di posisi teratas atau setidaknya dalam jajaran lima besar dunia. Peringkat ini mencerminkan pengaruh

Harvard yang luar biasa dalam riset, publikasi, jaringan alumni, dan kontribusinya dalam bidang-bidang strategis seperti sains, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik.

Dominasi Harvard tidak terlepas dari faktor sejarah, sumber daya, dan jaringan kekuasaan yang dimilikinya. Sebagai universitas tertua di Amerika Serikat, Harvard telah membangun reputasinya sejak abad ke-17 dan terus berkembang menjadi pusat riset unggulan yang didukung dana hibah miliaran dolar. Akses terhadap sumber daya ini memungkinkan Harvard merekrut dosen dan peneliti terbaik, membangun fasilitas penelitian kelas dunia, dan memimpin dalam publikasi akademik yang berpengaruh secara global. Namun lebih dari sekadar keunggulan akademik, Harvard memiliki peran simbolik dalam struktur kekuasaan global. Ia telah menjadi “mahkota” dari sistem akademik Amerika, yang tidak hanya mencerminkan kualitas pendidikan tetapi juga menyuarakan ideologi dan nilai-nilai tertentu. Amsler dan Bolsmann (2012) menjelaskan bahwa sistem perankingan universitas global seperti QS dan THE sering kali tidak netral, melainkan memperkuat struktur sosial dan politik tertentu. Dalam hal ini, universitas seperti Harvard secara tidak langsung memperkuat eksklusi sosial dan dominasi epistemik yang menguntungkan negara-negara Barat .

Kehadiran Harvard sebagai pusat kekuasaan akademik juga memiliki efek dominasi simbolik terhadap universitas-universitas lain. Kampus ini sering dijadikan tolok ukur oleh institusi di seluruh dunia, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam aspek budaya, gaya kepemimpinan, sistem rekrutmen, hingga desain kurikulum. Akibatnya, banyak universitas di luar Amerika berupaya meniru model Harvard agar mendapat pengakuan dan legitimasi dalam sistem global, meskipun

konteks lokal mereka berbeda jauh. Dari perspektif geopolitik pendidikan, Harvard menjadi alat soft power Amerika yang sangat efektif. Banyak elit global adalah alumni Harvard, dan jaringan global yang dimilikinya menyebar ke berbagai sektor penting, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga organisasi internasional. Dengan kata lain, siapa pun yang pernah berkuliah di Harvard secara tidak langsung menjadi bagian dari jaringan kekuasaan global yang dikendalikan oleh logika, nilai, dan struktur dominasi Amerika Serikat.

Dalam dokumen yang ditemukan oleh pencarian internal, Harvard disebutkan sebagai “penanda tertinggi dari status akademik global.” Ini berarti bahwa kampus ini bukan sekadar institusi riset, tetapi simbol dari pencapaian tertinggi dalam dunia akademik yang diakui secara universal. Sebagai “mahkota” sistem akademik Amerika, Harvard berperan mengatur ulang hierarki global pendidikan tinggi, di mana hanya sedikit universitas dari luar negara Barat yang mampu bersaing di posisi tertinggi. Namun, dominasi Harvard juga menimbulkan kekhawatiran akan homogenisasi pengetahuan. Jika hanya model Harvard yang dijadikan standar, maka kita berisiko mengabaikan keberagaman perspektif, metode, dan nilai-nilai lokal dalam pendidikan tinggi. Ini dapat menyebabkan eksklusi akademik terhadap institusi-institusi dari negara berkembang yang sebenarnya juga memiliki kontribusi penting, tetapi tidak memenuhi indikator dan standar penilaian yang “dibentuk” oleh elite pendidikan seperti Harvard dan lembaga perankingan global. Meskipun demikian, tidak bisa disangkal bahwa Harvard memiliki kualitas akademik yang luar biasa. Banyak inovasi dan temuan penting lahir dari kampus ini. Namun, ketika universitas ini dijadikan model tunggal atau ideal universal,

maka sistem pendidikan global berpotensi kehilangan keragaman dan mengalami bias institusional yang mengakar. Kesimpulannya, Harvard lebih dari sekadar universitas top; ia adalah simbol kekuasaan dan dominasi dalam dunia akademik internasional. Posisinya sebagai “mahkota” sistem pendidikan tinggi Amerika mencerminkan struktur kekuasaan global yang dibentuk oleh sejarah, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran simbolik Harvard penting untuk membaca dinamika hegemoni akademik dalam persaingan global antara negara-negara besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

## **2.7 Kebangkitan Tiongkok: Munculnya Rivalitas**

### **2.7.1 Reformasi Pendidikan Tinggi Sejak 1980-an**

Tiongkok mulai melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan tingginya sejak dekade 1980-an, setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan dan dibukanya kembali pintu terhadap dunia luar. Reformasi ini merupakan bagian dari perubahan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang dimulai oleh kebijakan “reform and opening up” di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Dalam konteks pendidikan, pemerintah Tiongkok menyadari bahwa untuk menjadi negara maju dan bersaing secara global, mereka harus memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat dan modern. Sebelum reformasi, sistem pendidikan tinggi Tiongkok sangat terpusat, dogmatis, dan sering kali digunakan sebagai alat ideologis oleh negara. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya daya saing akademik. Namun,

sejak tahun 1980-an, pemerintah mulai melakukan pendekatan baru yang menekankan otonomi universitas, peningkatan kualitas, dan keterlibatan dengan dunia internasional. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan tata kelola universitas.

Salah satu langkah penting adalah memperluas peran universitas dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi. Sebelumnya, kegiatan riset lebih banyak dilakukan di lembaga-lembaga pemerintah, tetapi sejak reformasi, universitas diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam menghasilkan pengetahuan baru dan teknologi yang bisa langsung dimanfaatkan oleh industri. Hal ini membuka jalan bagi universitas-universitas Tiongkok untuk mulai berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjalin kerja sama internasional. Reformasi juga menekankan pentingnya efisiensi dan kompetisi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah mulai memberikan otonomi yang lebih luas kepada institusi pendidikan untuk mengelola anggaran, memilih mahasiswa, dan menentukan fokus penelitian. Di sisi lain, universitas juga dituntut untuk menunjukkan kinerja akademik dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu bersaing secara global. Resistensi terhadap hegemoni global, baik di bidang ekonomi maupun politik, dapat muncul melalui kebijakan alternatif negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara-negara besar (Setiyaningsih et al., 2024).

Menurut Mingyuan (1984), reformasi pendidikan tinggi di Tiongkok memiliki tiga karakter utama: pertama, desentralisasi pengelolaan institusi pendidikan; kedua, peningkatan keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi; dan ketiga, penekanan pada kualitas serta relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini membawa dampak signifikan terhadap cara universitas berfungsi, baik dari segi administratif maupun akademik. Perubahan ini juga disertai dengan upaya untuk mengadopsi sistem dan standar internasional dalam penilaian kualitas pendidikan. Salah satu indikator keberhasilan reformasi ini adalah meningkatnya jumlah universitas dan mahasiswa secara drastis. Pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi ke seluruh wilayah Tiongkok, termasuk daerah-daerah terpencil, sambil tetap menjaga standar kualitas di institusi elite. Selain itu, jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk studi meningkat secara signifikan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menginternalisasi standar pendidikan global ke dalam sistem domestik.

Reformasi pada dekade ini juga menandai dimulainya era keterbukaan internasional di sektor pendidikan tinggi. Tiongkok mulai membangun kerja sama dengan universitas-universitas ternama di dunia, mengundang profesor asing untuk mengajar, serta membuka program-program internasional di dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk membangun kredibilitas akademik global sekaligus membentuk jaringan pengetahuan yang kuat dan kompetitif. Meskipun proses reformasi tidak selalu mulus, termasuk tantangan dalam hal kualitas pengajaran, ketimpangan antar daerah, dan resistensi birokratis, namun secara umum reformasi pendidikan tinggi di Tiongkok telah meletakkan fondasi yang kuat bagi kebangkitan akademik negara

tersebut. Dalam beberapa dekade berikutnya, langkah-langkah ini akan menjadi dasar bagi inisiatif-inisiatif besar seperti “Project 985” dan “Double First-Class University Plan” yang bertujuan menjadikan universitas-universitas Tiongkok berada di jajaran terbaik dunia. Dengan reformasi yang dimulai sejak tahun 1980-an ini, Tiongkok berhasil mengubah wajah sistem pendidikan tingginya. Dari sistem yang tertutup dan didominasi ideologi, menjadi sistem yang dinamis, kompetitif, dan terintegrasi dengan dunia global. Inilah titik awal dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan akademik baru yang serius menyaingi dominasi Amerika Serikat di panggung internasional.

### **2.7.2 Investasi Besar Tiongkok: Project 985, Project 211, Double First-Class**

Setelah meletakkan fondasi reformasi pendidikan tinggi di era 1980-an, pemerintah Tiongkok tidak berhenti di situ. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, mereka mengambil langkah lebih strategis dan ambisius dengan meluncurkan berbagai proyek nasional untuk mendorong universitas-universitas unggulan agar bisa bersaing di tingkat dunia. Tiga inisiatif utama Project 211, Project 985, dan Double First-Class Menjadi bukti nyata dari betapa seriusnya negara dalam membangun kekuatan akademik sebagai bagian dari kekuatan nasional secara keseluruhan. Project 211 pertama kali diumumkan pada tahun 1995. Nama “211” sendiri merujuk pada tujuan memasuki abad ke-21 dengan sekitar 100 universitas unggulan yang bisa menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi nasional. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan standar pendidikan dan riset di universitas-universitas yang dipilih agar dapat menghasilkan

sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Melalui pendanaan besar dari pemerintah pusat, universitas-universitas yang tergabung dalam Project 211 menerima insentif untuk membangun laboratorium mutakhir, merekrut tenaga akademik berkualitas tinggi, dan memperkuat program riset yang strategis.

Beberapa tahun kemudian, Project 985 diluncurkan sebagai kelanjutan dan perluasan dari inisiatif sebelumnya. Proyek ini diumumkan secara resmi pada tahun 1998 oleh Presiden Jiang Zemin dalam rangka perayaan 100 tahun berdirinya Peking University. Fokus utama Project 985 adalah menjadikan sejumlah universitas Tiongkok sebagai “world-class universities.” Pendanaan untuk universitas yang tergabung dalam proyek ini jauh lebih besar dibanding Project 211, dan institusi seperti Tsinghua University dan Peking University menjadi penerima utama dari alokasi dana yang sangat besar. Mok (2012) mencatat bahwa melalui Project 985 dan 211, negara kembali hadir sebagai aktor utama dalam pembangunan pendidikan tinggi. Berbeda dengan model liberal di banyak negara Barat, di mana universitas dibiarkan bersaing dalam pasar pendidikan secara otonom, di Tiongkok negara justru mengambil peran yang sangat aktif dalam merancang, membiayai, dan mengarahkan perkembangan institusi akademik. Pendekatan ini menunjukkan model khas Tiongkok, yaitu *developmental state*, di mana negara tidak hanya menjadi regulator tetapi juga inisiator pembangunan sektor strategis, termasuk pendidikan.

Namun, tidak berhenti di sana, pada tahun 2015 pemerintah Tiongkok memperkenalkan program terbaru yang disebut sebagai “Double First-Class University Plan.” Program ini bertujuan untuk menciptakan universitas dan disiplin

ilmu yang masuk dalam kategori kelas satu dunia. Tidak seperti Project 985 dan 211 yang lebih berfokus pada institusi tertentu, Double First-Class menekankan pada pengembangan keunggulan di bidang-bidang studi tertentu di banyak universitas. Artinya, tidak hanya universitas elite di Beijing atau Shanghai yang mendapatkan perhatian, tetapi juga universitas-universitas regional yang memiliki potensi unggul di bidang-bidang tertentu. Program ini menunjukkan perubahan pendekatan: dari hanya memperkuat institusi tertentu menjadi membangun ekosistem pendidikan tinggi nasional yang lebih merata dan berdaya saing. Kriteria evaluasi dalam program ini juga lebih berorientasi pada capaian global, seperti jumlah publikasi ilmiah internasional, paten teknologi, kolaborasi global, dan peringkat universitas dunia. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok tidak hanya ingin membangun universitas yang bagus di dalam negeri, tetapi juga institusi yang mampu menjadi pusat ilmu pengetahuan global.

Dampak dari ketiga program ini sangat besar. Universitas-universitas penerima pendanaan mengalami lonjakan dalam peringkat global, menarik mahasiswa dan dosen dari seluruh dunia, serta membangun kemitraan akademik dengan universitas ternama seperti Harvard, Oxford, dan MIT. Dalam banyak hal, universitas-universitas unggulan Tiongkok sudah mulai menjadi pesaing serius bagi universitas di Amerika Serikat, baik dalam hal kuantitas riset, kualitas laboratorium, maupun reputasi akademik internasional. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan yang makin lebar antara universitas elite dan non-elite. Universitas yang tidak masuk dalam daftar program-program unggulan ini sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana, menarik

talenta akademik, atau membangun reputasi internasional. Meskipun secara nasional ada kemajuan signifikan, ketimpangan di antara institusi juga menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.

Secara keseluruhan, melalui Project 211, 985, dan Double First-Class, Tiongkok berhasil mengubah lanskap pendidikan tingginya. Negara bukan hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai investor dan arsitek utama dalam pembangunan universitas unggulan. Inilah yang membedakan strategi Tiongkok dari banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat. Di saat banyak negara mulai mengurangi pembiayaan pendidikan tinggi, Tiongkok justru menggandakan investasinya, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari strategi nasional menuju negara adidaya di bidang ekonomi, teknologi, dan pengetahuan.

### **2.7.3 Kampus Seperti Tsinghua, Peking, dan Hong Kong University Naik**

#### **Secara Tajam**

Kebijakan reformasi dan investasi besar yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok sejak akhir abad ke-20 telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Beberapa universitas di negara tersebut berhasil menanjak ke posisi teratas dalam pemeringkatan global, menandingi institusi-institusi ternama dari Barat. Di antara yang paling menonjol adalah Tsinghua University, Peking University, dan The University of Hong Kong. Ketiga kampus ini kini menjadi simbol dari kebangkitan akademik Tiongkok, yang semakin menegaskan posisinya sebagai pesaing serius Amerika Serikat dalam bidang pendidikan tinggi. Tsinghua University, yang

berlokasi di Beijing dan awalnya dikenal sebagai sekolah persiapan bagi mahasiswa Tiongkok yang akan studi ke Amerika Serikat, kini telah berubah menjadi universitas teknologi dan teknik yang diakui secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, Tsinghua secara konsisten masuk dalam 20 besar peringkat dunia untuk bidang teknik dan ilmu komputer. Tidak hanya dari segi infrastruktur dan fasilitas laboratorium, Tsinghua juga dikenal karena standar penerimaan mahasiswa yang sangat ketat dan reputasinya dalam riset strategis, termasuk dalam bidang kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Menurut Golley dan Song (2011), keberhasilan Tsinghua mencerminkan sinergi antara dukungan negara, otonomi akademik yang terarah, serta jaringan kerja sama internasional yang selektif dan strategis (Golley & Song, 2011).

Peking University, atau Beida, juga mengalami lonjakan luar biasa dalam reputasi akademik internasional. Sebagai salah satu universitas tertua dan paling prestisius di Tiongkok, Beida memainkan peran penting dalam produksi pengetahuan dan kebijakan publik. Dalam beberapa pemeringkatan dunia, Peking berada di posisi 30 besar, bersaing langsung dengan universitas seperti Columbia atau LSE. Keunggulan universitas ini terletak pada kekuatan riset multidisipliner, mulai dari humaniora hingga ilmu alam, serta perannya sebagai inkubator bagi elite politik dan intelektual Tiongkok. Dosen-dosen dari Beida sering terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh besar dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang kompetitif secara global. The University of Hong Kong (HKU), meskipun secara geografis dan historis memiliki latar belakang kolonial Inggris, kini telah diintegrasikan ke dalam sistem akademik

Tiongkok dengan tetap mempertahankan standar internasionalnya. HKU dikenal karena kekuatannya dalam bidang kedokteran, hukum, dan ilmu sosial, serta karena posisinya sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Dengan sistem pengajaran bilingual, kolaborasi global, dan populasi mahasiswa internasional yang signifikan, HKU menjadi salah satu universitas Asia yang paling terbuka dan kompetitif di dunia.

Capaian tiga universitas ini tidak lepas dari kebijakan negara yang fokus pada penguatan daya saing global. Pemerintah Tiongkok tidak hanya menargetkan kuantitas lulusan atau jumlah universitas, tetapi juga kualitas riset dan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional. Pendanaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, rekrutmen akademisi kelas dunia, dan kemitraan strategis dengan universitas elite global. Golley dan Song menyebutkan bahwa pendekatan ini bukan hanya soal reputasi, tetapi merupakan bagian dari strategi kebangkitan Tiongkok dalam menghadapi dominasi Barat di bidang produksi pengetahuan dan inovasi (Golley & Song, 2011). Fenomena ini juga mencerminkan pergeseran peta kekuasaan akademik global. Jika dulu hanya universitas di Amerika Utara dan Eropa Barat yang mendominasi publikasi ilmiah, kini Tiongkok telah menjadi produsen pengetahuan utama, terutama dalam bidang STEM (science, technology, engineering, mathematics). Publikasi ilmiah dari peneliti Tiongkok meningkat tajam dan bahkan dalam beberapa bidang telah melampaui volume publikasi dari Amerika Serikat.

Keberhasilan universitas-universitas top Tiongkok juga berdampak pada pola mobilitas akademik. Semakin banyak mahasiswa internasional, termasuk dari

negara-negara maju, memilih Tiongkok sebagai tujuan studi karena kualitas pendidikannya yang terus meningkat dan biaya hidup yang lebih terjangkau dibandingkan dengan negara Barat. Beberapa program beasiswa seperti Chinese Government Scholarship dan Silk Road Scholarship juga memperkuat daya tarik ini. Namun, di balik pencapaian ini terdapat tantangan, terutama dalam mempertahankan kebebasan akademik dan keterbukaan intelektual. Beberapa pengamat menyatakan bahwa tekanan politik dalam negeri dan kontrol terhadap ekspresi akademik dapat membatasi ruang eksplorasi ilmiah di Tiongkok. Meski demikian, universitas seperti Tsinghua, Peking, dan HKU tetap menjadi pusat inovasi dan pemikiran strategis yang memainkan peran besar dalam transformasi global sistem pendidikan tinggi. Dengan capaian yang ada, sangat mungkin bahwa dalam waktu dekat universitas-universitas Tiongkok tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi tolok ukur baru dalam dunia akademik. Ketika Amerika Serikat berusaha mempertahankan dominasinya melalui pembatasan visa atau kebijakan protektif, Tiongkok justru memperluas akses dan daya tarik globalnya. Ini membuat persaingan antara kedua negara dalam bidang pendidikan menjadi semakin kompleks dan menarik untuk dianalisis.

## **2.8 Strategi Tiongkok Mengejar Amerika**

### **2.8.1 Mengirim Jutaan Mahasiswa ke Luar Negeri, Terutama ke AS**

Salah satu strategi utama Tiongkok dalam mengejar dominasi akademik Amerika Serikat adalah dengan mengirimkan jutaan mahasiswanya untuk belajar

ke luar negeri. Dari sekian banyak negara tujuan, Amerika Serikat menjadi pilihan paling populer. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas membangun kekuatan lunak (soft power), memperluas jaringan internasional, serta menyerap ilmu pengetahuan dari pusat-pusat akademik dunia. Konsep soft power dan diplomasi yang digunakan Tiongkok dalam persaingan global tidak hanya terjadi di bidang ekonomi atau kesehatan, tetapi juga pendidikan tinggi, di mana negara-negara saling berlomba menggunakan instrumen non-tradisional untuk memperkuat pengaruhnya (Rahmasari et al., 2022). Dengan cara ini, Tiongkok berharap dapat mempercepat proses modernisasi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak reformasi pendidikan tinggi di tahun 1980-an, pemerintah Tiongkok mulai memberikan perhatian besar terhadap internasionalisasi pendidikan. Salah satu langkah konkret adalah mendorong mahasiswanya untuk menempuh studi di luar negeri dengan berbagai skema pendanaan, baik dari pemerintah maupun swasta. Data menunjukkan bahwa sejak awal 2000-an, jumlah mahasiswa Tiongkok yang belajar di luar negeri terus meningkat pesat. Menurut data dari Institute of International Education (IIE), pada tahun 2019 saja, lebih dari 370.000 mahasiswa Tiongkok terdaftar di institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar di negara tersebut. Mereka tersebar di berbagai bidang studi, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), yang merupakan fondasi dari kekuatan akademik dan industri masa depan.

Strategi pengiriman mahasiswa ini tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara untuk memperkuat kemampuan dalam inovasi dan riset. Dengan menempatkan generasi mudanya di universitas-universitas top dunia, pemerintah berharap para lulusan ini kelak akan membawa pulang pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang dapat digunakan untuk mempercepat kemajuan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai strategi "reverse brain drain" mendorong kembalinya talenta yang sebelumnya belajar atau bekerja di luar negeri agar berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional. Namun, pengiriman mahasiswa ke luar negeri bukan sekadar persoalan peningkatan kualitas individu. Ini adalah bagian dari diplomasi pendidikan dan bentuk soft power yang canggih. Ketika mahasiswa Tiongkok menempuh studi di kampus-kampus Amerika, mereka juga menjadi duta budaya yang membawa identitas nasionalnya ke dalam pergaulan global. Kehadiran mereka memperkenalkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai Tiongkok secara tidak langsung. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kampus baik akademik maupun sosial juga memberi kontribusi positif bagi keberagaman dan pertukaran pengetahuan di tingkat internasional.

Dalam konteks hubungan internasional, pengiriman mahasiswa ke Amerika juga membawa makna strategis yang lebih dalam. Hang (2017) menyebut bahwa pendidikan luar negeri menjadi alat penting bagi negara-negara seperti Tiongkok untuk memperkuat legitimasi internasional dan membangun pengaruh jangka panjang, tanpa harus menempuh jalur militer atau konfrontatif. Dalam hal ini, pendidikan menjadi medan persaingan yang tidak kalah penting dibandingkan

sektor ekonomi atau teknologi. Mahasiswa Tiongkok yang menempuh studi di Amerika bukan hanya konsumen pendidikan, tetapi juga bagian dari diplomasi budaya dan strategi nasional yang terencana dengan baik (Hang, 2017). Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, khususnya sejak masa pemerintahan Donald Trump, membawa tantangan baru. Kekhawatiran terhadap isu-isu keamanan nasional, spionase teknologi, dan persaingan ekonomi menyebabkan munculnya berbagai pembatasan terhadap mahasiswa dan peneliti asal Tiongkok. Beberapa kebijakan seperti pembatasan visa dan pengawasan ketat terhadap kolaborasi akademik menjadi hambatan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi kini telah menjadi medan persaingan strategis antara dua kekuatan global, dan mahasiswa menjadi aktor penting di dalamnya.

Meskipun demikian, Tiongkok tidak menghentikan upayanya. Bahkan, negara ini mulai memperluas tujuan studi bagi mahasiswanya ke negara-negara lain seperti Australia, Inggris, Kanada, dan negara-negara Eropa. Strategi diversifikasi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem pendidikan Amerika sekaligus memperluas jangkauan pengaruh global. Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan insentif agar para lulusan luar negeri mau kembali ke tanah air, seperti memberikan tunjangan riset, posisi strategis di universitas, dan kesempatan mengelola proyek-proyek prestisius. Keberhasilan strategi ini terlihat dari semakin banyaknya alumni luar negeri yang kini menduduki posisi penting di berbagai institusi pendidikan dan pemerintahan di Tiongkok. Mereka membawa perspektif global yang memperkaya wacana kebijakan publik dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Hal ini membuktikan bahwa investasi jangka panjang dalam pendidikan internasional bukanlah sia-sia, melainkan strategi yang membawa hasil nyata bagi kekuatan nasional. Secara keseluruhan, pengiriman mahasiswa ke luar negeri menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam strategi Tiongkok untuk mengejar dominasi akademik Amerika Serikat. Ini adalah bentuk diplomasi intelektual yang cerdas, dengan tujuan ganda: memperkuat kapasitas domestik dan membangun pengaruh global melalui jaringan alumni yang tersebar di seluruh dunia.

### **2.8.2 Membangun Universitas Riset Berkelas Dunia di Dalam Negeri**

Salah satu langkah strategis Tiongkok dalam mengejar ketertinggalannya dari Amerika Serikat di bidang pendidikan tinggi adalah membangun universitas riset berkelas dunia di dalam negeri. Strategi ini muncul dari kesadaran bahwa ketergantungan berlebihan terhadap pendidikan luar negeri memiliki risiko besar, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, sejak dua dekade terakhir, Tiongkok mulai meluncurkan berbagai program nasional ambisius yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan universitasnya agar sejajar dengan kampus-kampus elite dunia seperti Harvard, MIT, atau Stanford. Inisiatif besar pertama muncul pada akhir 1990-an dengan peluncuran Project 985 dan Project 211, dua kebijakan strategis yang menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan tinggi Tiongkok. Kedua proyek ini dirancang oleh pemerintah pusat untuk memberikan pendanaan besar-besaran kepada universitas-universitas unggulan agar mampu bersaing di tingkat internasional, baik dari segi fasilitas,

sumber daya manusia, publikasi ilmiah, hingga kolaborasi global. Target utamanya adalah membangun “universitas kelas dunia” yang dapat menjadi simbol modernitas, inovasi, dan kebanggaan nasional.

Project 985, yang diluncurkan pada tahun 1998, berfokus pada pengembangan universitas unggulan melalui investasi signifikan untuk membangun kampus, merekrut dosen berkualitas internasional, dan mendorong produksi penelitian. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah lonjakan posisi universitas-universitas Tiongkok dalam berbagai pemeringkatan internasional. Universitas seperti Tsinghua University dan Peking University kini secara konsisten masuk dalam jajaran 50 besar dunia menurut QS dan THE Rankings, menunjukkan lompatan yang sangat signifikan dibandingkan dua dekade sebelumnya. Upaya ini dilanjutkan dengan peluncuran Double First-Class University Plan pada tahun 2017, yang bertujuan menciptakan universitas dan program studi kelas satu di seluruh negeri. Strategi ini menandai transisi dari pendekatan eksklusif yang hanya berfokus pada universitas elite pendekatan inklusif yang mencoba memperluas standar kualitas ke lebih banyak institusi. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya ingin membangun simbol kekuatan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang menyeluruh, kompetitif, dan berorientasi pada hasil jangka panjang (Mok, 2012).

Hal yang menarik dari strategi ini adalah bagaimana pemerintah Tiongkok mengintegrasikan pembangunan pendidikan tinggi ke dalam agenda pembangunan nasional. Universitas tidak lagi hanya dipandang sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat produksi teknologi, inovasi ekonomi, dan kekuatan diplomasi

budaya. Pemerintah memberi insentif besar kepada kampus-kampus untuk menjalin kerja sama internasional, mengembangkan laboratorium canggih, serta meningkatkan output publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi global. Dengan begitu, Tiongkok tidak hanya membangun “gedung kampus,” tetapi juga membangun struktur kekuasaan pengetahuan yang dapat memperkuat posisi globalnya dalam jangka panjang. Mok (2012) menyatakan bahwa pendekatan ini menandai kembalinya peran negara dalam pendidikan tinggi di Tiongkok setelah sebelumnya lebih banyak memberikan ruang kepada logika pasar. Negara mengambil peran langsung dalam mengatur arah pengembangan universitas melalui kebijakan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Dengan kontrol yang kuat ini, pemerintah mampu memastikan bahwa tujuan pembangunan universitas tetap selaras dengan prioritas nasional seperti pengembangan teknologi tinggi, inovasi strategis, dan keunggulan ilmiah (Mok, 2012).

Keberhasilan strategi ini terlihat jelas dari lonjakan output ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti dan institusi Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok menjadi salah satu negara dengan publikasi ilmiah terbanyak di dunia, mengalahkan Amerika Serikat dalam beberapa kategori. Tidak hanya itu, universitas-universitas Tiongkok juga mulai menarik perhatian mahasiswa dan akademisi asing yang melihat potensi baru di Asia Timur sebagai pusat riset global. Namun, keberhasilan ini juga mengundang kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pembangunan universitas di Tiongkok masih menghadapi tantangan seperti kebebasan akademik yang terbatas, birokrasi yang kaku, serta tekanan politik terhadap topik-topik sensitif. Meski begitu, pencapaian Tiongkok tetap signifikan,

terutama jika dilihat dari segi kecepatan transformasi dan skala investasi yang dilakukan. Dalam waktu singkat, negara ini berhasil mengubah peta kekuatan akademik dunia dan mengukuhkan dirinya sebagai pesaing utama Amerika Serikat dalam sektor pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, strategi membangun universitas riset kelas dunia di dalam negeri menjadi fondasi penting bagi ambisi Tiongkok mengejar dominasi akademik global. Dengan dukungan penuh dari negara, program jangka panjang yang konsisten, dan orientasi global yang kuat, Tiongkok berhasil menciptakan institusi akademik yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga simbol dari kebangkitan nasional di bidang ilmu pengetahuan.

### **2.8.3 Confucius Institute dan Kerja Sama Internasional Sebagai Alat Soft Power**

Selain membangun kekuatan akademik di dalam negeri, Tiongkok juga memanfaatkan strategi eksternal melalui kerja sama internasional dan lembaga budaya seperti Confucius Institute. Strategi ini menjadi bagian penting dari upaya membentuk citra positif dan memperluas pengaruh Tiongkok secara global tanpa konfrontasi langsung, atau yang biasa disebut soft power. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya dilihat sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena diplomasi budaya yang sangat efektif. Confucius Institute (CI) didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok ke berbagai negara. Lembaga ini mulai aktif sejak 2004, dan dalam waktu singkat telah membuka ratusan cabang di universitas-universitas ternama di seluruh

dunia. CI bekerja sama dengan lembaga pendidikan lokal untuk menyelenggarakan kursus bahasa Mandarin, pertukaran budaya, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Menurut Paradise (2009), keberadaan CI menjadi simbol keinginan Tiongkok untuk memainkan peran aktif dalam pertukaran budaya internasional sekaligus membentuk narasi global tentang negaranya melalui pendekatan yang lebih lunak dan bersahabat.

Strategi ini menunjukkan bahwa Tiongkok belajar dari keberhasilan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam menggunakan pendidikan sebagai alat diplomasi. AS memiliki program seperti Fulbright untuk menyebarkan nilai-nilainya dan menjalin hubungan dengan para pemimpin masa depan di negara lain. Tiongkok mencoba mengembangkan versi tersendiri dari pendekatan itu dengan CI, meskipun dengan gaya yang lebih terpusat dan didukung langsung oleh pemerintah. Lembaga-lembaga ini sering diposisikan di dalam universitas untuk memperkuat legitimasi akademiknya serta menjangkau kalangan muda yang menjadi target strategis dalam penyebaran pengaruh jangka panjang (Paradise, 2009). Namun, meskipun CI membawa manfaat berupa pertukaran budaya dan kemudahan belajar bahasa Mandarin, keberadaannya tidak lepas dari kontroversi. Beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Kanada, mulai mencurigai motif di balik ekspansi besar-besaran lembaga ini. Mereka menilai bahwa CI bisa menjadi alat propaganda terselubung yang berpotensi membatasi kebebasan akademik dan menyebarkan narasi sepihak tentang kebijakan dalam negeri Tiongkok. Sejumlah universitas bahkan memutuskan kerja sama dengan CI karena khawatir terhadap tekanan politik yang mungkin muncul akibat kolaborasi tersebut. Schmidt (2013)

menyebut bahwa keberadaan CI mencerminkan ketegangan antara niat untuk membangun harmoni internasional dengan upaya untuk tetap mengontrol narasi budaya yang disampaikan kepada dunia luar.

Meskipun demikian, strategi Tiongkok tidak hanya terbatas pada Confucius Institute. Negara ini juga aktif menjalin kerja sama akademik bilateral dengan banyak negara, termasuk melalui program pertukaran dosen, proyek riset bersama, dan pendanaan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar di Tiongkok. Ini menjadi cara lain bagi Tiongkok untuk membangun hubungan jangka panjang, menciptakan jejaring global, dan memperkuat citra negaranya sebagai mitra yang setara, bukan pesaing yang mengancam. Starr (2009) menjelaskan bahwa kerja sama ini memperkuat persepsi bahwa Tiongkok adalah kekuatan besar yang bukan hanya mengandalkan ekonomi dan teknologi, tetapi juga nilai-nilai kebudayaan dan sistem pendidikan yang kuat. Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang belajar di Tiongkok menjadi bukti bahwa negara tersebut semakin mampu menarik perhatian komunitas global, bahkan dari negara-negara maju. Artinya, Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan dari AS, tetapi juga mulai menciptakan jalur pengaruhnya sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa strategi soft power ini berbeda dari pendekatan kekuatan keras (hard power) seperti sanksi ekonomi atau tekanan militer. Dalam strategi soft power, reputasi, citra, dan hubungan emosional menjadi kunci keberhasilan. Tiongkok menggunakan pendidikan sebagai kendaraan untuk membangun citra sebagai negara modern, terbuka, dan berbudaya tinggi. Dengan menciptakan ketertarikan daripada ketakutan, mereka berharap dapat memperluas

pengaruhnya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Sebagai hasilnya, kebijakan ini menantang dominasi Amerika dalam bidang pendidikan global. Jika sebelumnya mahasiswa dari negara berkembang cenderung memilih AS atau Eropa sebagai destinasi studi utama, kini semakin banyak yang mempertimbangkan Tiongkok sebagai alternatif. Ini memperkuat posisi Tiongkok dalam peta pendidikan dunia dan mendukung ambisinya untuk menjadi kekuatan akademik global.

Dengan semua upaya tersebut, Tiongkok menunjukkan bahwa strategi membangun kekuatan akademik tidak hanya dilakukan melalui pencapaian di dalam negeri, tetapi juga melalui diplomasi pendidikan yang menyasar ke berbagai belahan dunia. Confucius Institute dan kerja sama internasional hanyalah dua contoh dari pendekatan ini, namun keduanya memiliki peran penting dalam memperluas pengaruh dan membentuk persepsi global tentang Tiongkok sebagai negara yang patut diperhitungkan, tidak hanya dari sisi ekonomi dan militer, tetapi juga budaya dan pendidikan.

## **2.9 Persaingan Terbuka: AS vs Tiongkok dalam Dunia Akademik**

### **2.9.1 Ketegangan Mengenai Kolaborasi Riset dan Isu Keamanan**

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang akademik semakin menegang. Ketegangan ini bukan hanya terjadi pada level diplomatik atau ekonomi, tetapi juga merambat ke dunia pendidikan tinggi, terutama dalam kolaborasi riset antar universitas. Kolaborasi riset yang dulunya menjadi simbol kerja sama lintas negara kini berubah menjadi ladang kecurigaan dan pembatasan. Amerika Serikat mulai melihat kerja sama riset,

khususnya dengan institusi dari Tiongkok, sebagai celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan yang berisiko terhadap keamanan nasional. Ketegangan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa kemajuan pesat Tiongkok di bidang sains dan teknologi sebagian besar dibantu oleh kerja sama riset internasional, termasuk dari kampus-kampus elite di Amerika Serikat. Pemerintah AS menilai bahwa beberapa kerja sama ini tidak selalu berlangsung dalam semangat pertukaran ilmiah yang murni. Ada dugaan bahwa dalam beberapa kasus, peneliti dari Tiongkok memanfaatkan kolaborasi riset untuk memperoleh teknologi strategis yang dapat digunakan untuk kepentingan nasional Tiongkok. Bahkan dalam bidang pertahanan atau industri sensitif.

Sebagai respons, Amerika Serikat memperketat aturan dan pengawasan terhadap proyek-proyek riset bersama. Pemerintah mulai mengatur lebih ketat dana riset yang berasal dari luar negeri dan memperkenalkan proses penyaringan yang lebih rinci terhadap kolaborasi dengan peneliti asing. Salah satu bentuk nyata dari ketegangan ini adalah penolakan visa atau pembatalan beasiswa terhadap mahasiswa dan peneliti dari Tiongkok yang dianggap memiliki hubungan dengan institusi yang dikategorikan “berisiko” oleh pemerintah AS. Langkah ini tentu berdampak besar pada kerja sama ilmiah internasional, khususnya dalam proyek-proyek besar yang melibatkan dana bersama dan laboratorium lintas negara. Universitas di Amerika, yang selama puluhan tahun menjadi pusat internasionalisasi ilmu pengetahuan, kini berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka memiliki komitmen terhadap kolaborasi ilmiah global dan kebebasan akademik. Namun di sisi lain, mereka juga harus mengikuti regulasi federal yang

semakin membatasi ruang kerja sama tersebut. Ketegangan ini menciptakan dilema: menjaga keamanan nasional atau mempertahankan posisi sebagai pusat riset global yang terbuka. Dalam konteks ini, kampus tidak lagi hanya berperan sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga menjadi bagian dari strategi geopolitik negara.

Menurut Balaram (2010), kolaborasi dan kompetisi dalam dunia akademik berjalan berdampingan. Kampus-kampus riset memang mendorong kerja sama lintas negara demi kemajuan ilmu pengetahuan, namun mereka juga sadar bahwa dalam dunia yang semakin terhubung secara global, batas antara pertukaran akademik dan persaingan strategis bisa sangat tipis. Negara-negara yang unggul dalam riset ilmiah dan teknologi bukan hanya mendapat reputasi global, tetapi juga pengaruh politik dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam pandangan strategis, kerja sama riset pun bisa menjadi instrumen kekuasaan yang harus dikendalikan [Balaram, 2010]. Dalam kerangka itu, kolaborasi ilmiah yang dulunya netral kini menjadi “medan baru” bagi pertarungan pengaruh global. Pemerintah AS, melalui berbagai lembaga seperti FBI dan Departemen Pendidikan, memperketat pengawasan terhadap dana riset, sumber pendanaan luar negeri, serta keterlibatan peneliti asing. Bahkan, sejumlah kampus besar seperti MIT, Harvard, dan Stanford telah menerima surat peringatan atau diminta untuk meninjau ulang kerja sama mereka dengan institusi asing.

Dampak dari kebijakan ini sangat luas. Banyak program riset bersama harus dihentikan atau ditunda, dan sebagian mahasiswa serta peneliti dari Tiongkok menghadapi kesulitan administratif, bahkan diskriminasi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi bahwa pendekatan yang terlalu ketat justru

akan menghambat pertumbuhan ilmu pengetahuan global dan menggerus kepercayaan internasional terhadap institusi akademik AS. Kolaborasi, yang seharusnya menjadi jembatan antarbangsa, kini justru menjadi titik konflik dan kecurigaan. Kritik terhadap kebijakan ini juga datang dari dalam negeri AS sendiri. Banyak akademisi menilai bahwa ketakutan berlebihan terhadap spionase akademik atau pencurian intelektual tidak didasarkan pada bukti kuat, tetapi lebih pada ketegangan geopolitik yang dibawa ke ranah pendidikan. Mereka memperingatkan bahwa pembatasan yang berlebihan dapat menurunkan daya saing kampus-kampus Amerika karena mengurangi keragaman peneliti dan kontribusi global dalam riset-riset strategis. Dengan demikian, kolaborasi riset internasional kini berada dalam persimpangan jalan. Di tengah ketegangan AS–Tiongkok, kerja sama akademik harus ditata ulang agar tetap bisa berlangsung tanpa mengorbankan keamanan nasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang kebijakan yang bijak: yang bisa memfilter risiko, tetapi tetap memberi ruang bagi pertukaran ilmu pengetahuan yang bebas dan saling menguntungkan.

### **2.9.2 Tiongkok Dicurigai Melakukan “Spionase Akademik”**

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran besar di kalangan pemerintah Amerika Serikat bahwa Tiongkok sedang memanfaatkan jalur akademik sebagai sarana untuk mencuri teknologi dan pengetahuan strategis dari institusi-institusi riset AS. Tuduhan ini dikenal dengan istilah “spionase akademik,” yakni kegiatan intelijen yang dilakukan secara terselubung melalui jalur pendidikan, seperti mengirim peneliti, mahasiswa, atau dosen ke luar negeri dengan

tujuan utama bukan untuk belajar, melainkan mengakses informasi sensitif yang memiliki nilai strategis bagi negara asal mereka. Kecurigaan terhadap Tiongkok tidak datang begitu saja. Pemerintah Amerika mulai memperhatikan meningkatnya jumlah peneliti dan mahasiswa Tiongkok di bidang-bidang teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), teknik sipil, bioteknologi, dan sistem pertahanan. Dalam beberapa kasus, otoritas federal mengungkapkan adanya aktivitas mencurigakan, seperti kegagalan peneliti asal Tiongkok dalam mendeklarasikan pendanaan riset dari pemerintah mereka atau membawa pulang informasi yang belum dipublikasikan dari laboratorium Amerika.

Kekhawatiran ini menyebabkan munculnya berbagai tindakan protektif dari pemerintah AS. Beberapa di antaranya adalah peluncuran program "Tiongkok Initiative" oleh Departemen Kehakiman pada tahun 2018, yang secara eksplisit bertujuan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus spionase ekonomi dan akademik yang diduga berasal dari Tiongkok. Walaupun banyak kasus tidak sampai ke tahap pembuktian, inisiatif ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi tentang potensi diskriminasi terhadap ilmuwan keturunan Tionghoa atau siapa pun yang berafiliasi dengan institusi di Tiongkok. Allison (2017) menjelaskan bahwa konflik antara AS dan Tiongkok semakin terlihat sebagai benturan antara dua peradaban besar yang berebut pengaruh global termasuk dalam ranah ilmu pengetahuan. Ia menyatakan bahwa kedua negara tidak hanya bersaing dalam kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dalam menguasai masa depan melalui riset dan inovasi teknologi. Dalam kondisi ini, ketidakpercayaan terhadap aktivitas

akademik menjadi bagian dari pertarungan geopolitik yang lebih besar [Allison, 2017].

Pandangan ini juga diperkuat oleh Hu (2020) yang menyebut bahwa dalam strategi Indo-Pasifik, Amerika Serikat memandang Tiongkok sebagai pesaing utama yang harus diwaspadai di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Amerika khawatir bahwa peningkatan pesat kapasitas akademik dan teknologi Tiongkok tidak hanya berdampak pada dominasi ekonomi, tetapi juga pada kemampuan strategis militer. Oleh karena itu, kerja sama akademik yang sebelumnya dianggap sebagai jembatan pemahaman antarbangsa kini malah dicurigai sebagai alat infiltrasi [Hu, 2020]. Situasi ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, universitas-universitas AS tetap ingin menjadi tempat terbuka untuk pertukaran ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, mereka ditekan untuk membatasi kerja sama dengan peneliti atau lembaga dari Tiongkok demi alasan keamanan nasional. Beberapa universitas bahkan menutup pusat riset bersama dengan Tiongkok atau memperketat seleksi terhadap mahasiswa dan peneliti asing. Akibatnya, suasana kerja sama ilmiah menjadi tegang dan penuh kecurigaan.

Selain berdampak pada kerja sama riset, tuduhan spionase akademik ini juga berdampak besar terhadap citra mahasiswa Tiongkok di AS. Banyak dari mereka merasa tertekan dan diawasi, meskipun tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun. Kasus-kasus ini menimbulkan perdebatan luas tentang apakah pemerintah AS telah melangkah terlalu jauh dalam menanggapi ancaman keamanan. Di banyak kampus, akademisi menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru mengancam prinsip dasar akademik seperti kebebasan intelektual dan kepercayaan

internasional. Selain itu, pendekatan yang terlalu represif juga berisiko merusak reputasi Amerika sebagai pusat pendidikan global. Jika peneliti asing merasa tidak aman atau tidak diterima, mereka bisa memilih untuk mengalihkan tujuan studi dan riset ke negara lain. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperlemah posisi Amerika sebagai pusat inovasi dan menurunkan daya saing globalnya dalam ilmu pengetahuan.

Namun, dari sudut pandang pemerintah AS, langkah-langkah ini dianggap penting untuk melindungi kepentingan strategis nasional. Teknologi canggih dan pengetahuan ilmiah tidak hanya digunakan untuk tujuan sipil, tetapi juga bisa dimanfaatkan dalam industri militer dan pertahanan. Oleh karena itu, kontrol terhadap siapa yang bisa mengakses informasi tertentu menjadi isu yang sangat krusial. Pemerintah tidak ingin kecolongan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Tuduhan terhadap Tiongkok sebagai pelaku spionase akademik tidak hanya datang dari satu sumber, melainkan dari rangkaian kasus yang dianggap memiliki pola serupa. Namun demikian, tidak semua tuduhan dapat dibuktikan secara hukum, dan beberapa kasus bahkan berakhir dengan pembebasan. Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah isu spionase ini benar-benar berbasis fakta atau hanya bagian dari strategi politik untuk membatasi pengaruh Tiongkok. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum untuk melihat isu ini secara berimbang. Perlindungan terhadap keamanan nasional tentu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai dasar akademik dan kepercayaan antarbangsa. Keseimbangan antara keamanan dan

keterbukaan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan geopolitik di dunia pendidikan tinggi.

### **2.9.3 Efek Material Hegemon: Konsekuensi Nyata dari Pencurian Ilmu Amerika oleh Tiongkok Melalui Pendidikan Tinggi**

Perkembangan Tiongkok sebagai kekuatan teknologi dunia tidak lepas dari strategi mereka dalam memperoleh pengetahuan dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Salah satu jalur utama adalah pendidikan tinggi, di mana universitas top seperti Harvard menjadi magnet bagi mahasiswa dan peneliti Tiongkok. Namun, hal ini menghadirkan dilema besar bagi Amerika di satu sisi, keterbukaan kampus seperti Harvard memperkaya ekosistem inovasi global, tetapi di sisi lain membuka peluang “kebocoran” ilmu strategis ke Tiongkok, yang dampaknya sangat nyata pada ekonomi, teknologi, dan keamanan nasional (Rasser et al., 2019).

Kasus Charles Lieber adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana jalur pendidikan tinggi bisa menjadi sarana transfer pengetahuan strategis, bahkan hingga ke ranah hukum dan keamanan nasional. Charles Lieber adalah seorang profesor terkenal di bidang kimia di Harvard University yang ditangkap oleh otoritas federal AS pada Januari 2020. Lieber didakwa karena diam-diam menerima dana besar dari program “Thousand Talents” milik pemerintah Tiongkok, tanpa melaporkan kerja samanya pada universitas maupun pemerintah AS, serta berbohong kepada FBI mengenai keterlibatan dan aliran dananya. Melalui posisinya di Harvard, Lieber diduga membantu membangun laboratorium riset canggih di Wuhan, sekaligus mengakses riset-riset sensitif yang belum

dipublikasikan dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan strategis Tiongkok (Nytimes, 2023).

Skandal ini menyoroti bagaimana kolaborasi dan mobilitas ilmuwan antarnegara bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk pertukaran ilmu secara legal, namun juga menjadi jalur transfer teknologi yang “terlarang.” Dalam persidangan, terungkap juga bahwa Lieber merekrut mahasiswa-mahasiswa Tiongkok dan mengirimkan hasil riset laboratorium Harvard ke mitra riset di Tiongkok. Otoritas AS menegaskan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari praktik “academic espionage” yang marak, terutama pada bidang sains dan teknologi yang sangat strategis bagi keamanan dan daya saing Amerika .

Dampak dari kasus-kasus semacam Lieber adalah semakin ketatnya kebijakan pemerintah AS terhadap mahasiswa dan peneliti Tiongkok, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Pada tahun 2020, pemerintah Amerika memperketat pemberian visa pelajar untuk warga Tiongkok yang akan studi di bidang-bidang strategis, dan melakukan screening ekstra untuk mengetahui apakah mereka punya keterkaitan dengan institusi militer Tiongkok atau program transfer teknologi yang dikelola pemerintahnya. Pemerintah AS secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa “pengetahuan Amerika bocor dan dipakai untuk membangun kekuatan militer serta ekonomi Tiongkok” BBC menulis, “Pemerintah AS menuding Tiongkok melakukan upaya sistematis untuk mencuri riset sains dan teknologi AS, baik lewat program pelajar, kolaborasi riset, maupun aktivitas cyber espionage. Akibatnya, ribuan mahasiswa Tiongkok terkena

pembatasan visa atau bahkan dideportasi jika dianggap membahayakan kepentingan strategis Amerika” (BBC, 2020) .

Konsekuensi nyata dari “pencurian” pengetahuan dan teknologi ini terlihat dari besarnya kerugian ekonomi AS. Laporan resmi menyebutkan bahwa nilai kerugian akibat pencurian IP (intellectual property) oleh Tiongkok mencapai hingga 600 miliar dolar AS setiap tahun, belum termasuk kerugian akibat persaingan pasar global saat produk-produk Tiongkok hasil replikasi inovasi Amerika beredar luas dan bahkan lebih murah. Selain kerugian ekonomi, efek material lainnya adalah pergeseran kepemimpinan teknologi. Tiongkok kini tidak hanya sekadar “peniru,” tetapi sudah menjadi inovator di bidang AI, 5G, dan teknologi militer. Banyak perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei atau ZTE, yang sebagian besar dipimpin oleh alumni universitas top AS, kini menyaingi perusahaan Amerika dalam inovasi produk dan penguasaan pasar global (Rasser & Lamberth, 2021).

Salah satu kekhawatiran utama pemerintah Amerika adalah penggunaan teknologi hasil riset universitas seperti Harvard untuk kepentingan militer Tiongkok. Laporan Center for a New American Security menegaskan bahwa banyak riset “dual-use” misal, AI yang bisa untuk aplikasi sipil dan militer dijadikan target utama pengumpulan informasi oleh aktor-aktor yang berafiliasi dengan pemerintah atau militer Tiongkok. Ratusan ilmuwan Tiongkok yang pernah belajar di AS kemudian terlibat dalam proyek strategis di negaranya, dan beberapa terbukti terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Pemerintah AS pun mendorong kampus dan lembaga riset agar meningkatkan pengawasan, membangun kerja sama dengan aparat keamanan, dan melakukan edukasi tentang risiko kebocoran pengetahuan. Namun, dilema tetap ada: antara menjaga keterbukaan akademik dan perlindungan terhadap keamanan nasional (Rasser et al., 2019). Efek material hegemon dari kebocoran pengetahuan Amerika ke Tiongkok melalui jalur pendidikan tinggi adalah nyata dan multidimensi. Ia berwujud kerugian ekonomi besar, melemahnya posisi inovasi dan pasar Amerika, hingga ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Kasus-kasus seperti Charles Lieber di Harvard dan pembatasan visa mahasiswa Tiongkok hanyalah permukaan dari isu besar yang kini terus berkembang seiring ketatnya persaingan global antara AS dan Tiongkok. Harvard dan universitas top Amerika lainnya berada di tengah pusaran dilema antara menjadi jembatan inovasi dunia atau tanpa sadar menjadi jalur kebocoran kekuatan strategis Amerika ke tangan pesaing utamanya.

#### **2.9.4 Amerika Mulai Membatasi Akses: Munculnya Kebijakan Seperti**

##### **Imigrasi 2025**

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam dunia akademik memuncak pada tahun 2025 ketika Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait imigrasi. Kebijakan ini secara langsung menyasar mahasiswa internasional di institusi-institusi elit seperti Harvard University, dengan dalih keamanan nasional dan kecurigaan terhadap pengaruh Tiongkok dalam dunia pendidikan tinggi. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pendidikan kini

telah menjadi arena konflik geopolitik yang semakin terbuka. Pada 4 Juni 2025, Presiden Trump menandatangani sebuah proklamasi yang menangguhkan penerbitan visa kategori F, M, dan J bagi mahasiswa asing baru yang akan menempuh studi di Harvard University. Selain itu, proklamasi tersebut membuka kemungkinan pencabutan visa bagi mahasiswa asing yang sudah terdaftar, terutama mereka yang berasal dari negara-negara yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional dengan Tiongkok sebagai sasaran utama. Pemerintah menyatakan bahwa kampus elit seperti Harvard dicurigai memiliki kedekatan yang terlalu erat dengan lembaga-lembaga riset Tiongkok, sehingga dikhawatirkan menjadi celah bagi pencurian informasi strategis.

Kebijakan ini menandai titik balik dalam pendekatan Amerika terhadap pendidikan tinggi global. Selama beberapa dekade sebelumnya, Amerika Serikat dikenal sebagai destinasi utama bagi mahasiswa internasional, terutama dari Asia. Sistem pendidikan tinggi Amerika dianggap unggul dalam hal fasilitas, kualitas riset, dan kebebasan berpikir. Namun, kebijakan baru ini mencerminkan adanya perubahan paradigma, dari keterbukaan dan kolaborasi ke arah proteksionisme dan selektivitas tinggi. Allison (2017) menjelaskan bahwa dalam konteks persaingan global, kebijakan seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk “tindakan defensif” dari negara hegemon. Dalam pandangannya, Amerika tengah mengalami kecemasan atas kebangkitan Tiongkok yang tidak hanya menentang dominasi ekonomi dan militer, tetapi juga keunggulan dalam sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap akses pendidikan dilihat sebagai upaya untuk

menjaga posisi dominan di tengah lanskap global yang berubah cepat [Allison, 2017].

Hu (2020) juga menekankan bahwa pendekatan Amerika yang semakin keras terhadap Tiongkok bukan hanya soal konflik kebijakan luar negeri, tetapi mencerminkan kembalinya logika kompetisi strategis ke dalam berbagai sektor domestik, termasuk pendidikan tinggi. Pemerintah Amerika kini melihat institusi pendidikan bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai titik kritis dalam menjaga keamanan nasional dan supremasi teknologi. Dengan kata lain, kampus telah menjadi medan kontestasi yang setara pentingnya dengan pangkalan militer atau jalur dagang [Hu, 2020]. Kebijakan imigrasi 2025 ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa langkah ini diperlukan demi melindungi informasi sensitif yang bisa digunakan untuk tujuan non-akademik oleh negara asing. Mereka menekankan pentingnya menyaring siapa saja yang dapat mengakses laboratorium riset, data penting, atau teknologi yang sedang dikembangkan di dalam negeri. Dalam situasi di mana pengetahuan dan teknologi menjadi aset strategis, kontrol terhadap arus manusia menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional.

Namun, di sisi lain, komunitas akademik termasuk pihak Harvard Menilai kebijakan ini sebagai bentuk pembatasan yang melanggar prinsip dasar pendidikan tinggi. Mereka berpendapat bahwa pendidikan seharusnya bersifat universal dan inklusif, bukan alat politik atau kepentingan geopolitik. Harvard bahkan mengambil langkah hukum untuk menantang proklamasi tersebut dan berhasil mendapatkan penangguhan pelaksanaan dari pengadilan federal di Boston. Langkah ini

menunjukkan bahwa ada resistensi kuat terhadap politisasi pendidikan dari dalam sistem itu sendiri. Pembatasan akses mahasiswa asing juga berpotensi menurunkan daya saing Amerika dalam jangka panjang. Mahasiswa internasional, terutama dari Tiongkok, selama ini berkontribusi besar dalam berbagai aspek mulai dari pembiayaan kampus, produksi riset, hingga reputasi internasional universitas. Jika akses ini dibatasi, bukan tidak mungkin mereka akan beralih ke negara lain seperti Inggris, Kanada, atau Australia yang menawarkan kebijakan lebih ramah. Pada akhirnya, Amerika bisa kehilangan posisi sebagai magnet utama talenta global.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi telah menjadi bagian integral dari pertarungan hegemonik antarnegara. Tidak hanya soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tetapi juga siapa yang menguasai jalur produksi pengetahuan global. Tindakan Amerika untuk membatasi akses ke kampus elit seperti Harvard adalah contoh bagaimana kekuasaan kini dipertahankan bukan hanya di ranah militer atau diplomatik, tetapi juga di ruang kelas dan laboratorium. Melalui kebijakan ini, Amerika Serikat tampaknya ingin mengirim sinyal kepada dunia bahwa dominasi akademik mereka bukan untuk dibagi. Tapi tindakan semacam ini justru memperlihatkan ketakutan akan kehilangan posisi, bukan rasa percaya diri atas keunggulan. Dalam sejarahnya, negara yang benar-benar kuat adalah negara yang membuka pintu, bukan menutupnya.

## 2.10 Harvard Sebagai Titik Panas Persaingan

Harvard University telah lama menjadi simbol kejayaan pendidikan tinggi Amerika Serikat. Dengan sejarah panjang sejak abad ke-17, universitas ini tidak hanya dikenal sebagai lembaga akademik unggulan, tetapi juga sebagai pusat produksi pengetahuan dan kebijakan yang berpengaruh dalam skala global. Dalam konteks persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, posisi simbolik Harvard sebagai benteng akademik Barat menjadikannya titik strategis dalam konflik kekuasaan yang berlangsung, terutama ketika pendidikan tinggi mulai dipandang sebagai wilayah persaingan geopolitik baru. Pada tahun 2025, Presiden Donald Trump menandatangani kebijakan kontroversial yang membatasi visa mahasiswa asing ke Harvard. Kebijakan tersebut langsung berdampak pada ribuan mahasiswa internasional, terutama dari Tiongkok, yang menjadi kelompok pelajar asing terbesar di universitas-universitas top AS. Dalam pengumuman resminya, pemerintahan Trump mengklaim bahwa pembatasan ini adalah bagian dari langkah untuk melindungi rahasia teknologi dan intelektual Amerika dari eksploitasi oleh aktor asing yang tidak bersahabat (Shear & Kanno-Youngs, 2025).

Reaksi dari Harvard sangat cepat dan tegas. Melalui gugatan hukum yang diajukan ke pengadilan, universitas ini menolak keras kebijakan tersebut dengan alasan bahwa pembatasan visa berbasis negara asal bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan akademik. Hakim federal kemudian mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap kebijakan tersebut, menandakan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi konflik hukum dan simbolik antara negara dan lembaga pendidikan (Politico, 2025). Mengapa Harvard menjadi target?

Jawabannya bukan hanya karena posisi akademiknya, tetapi karena makna simbolik yang melekat padanya. Harvard adalah contoh sempurna dari institusi yang melambangkan dominasi Barat dalam pendidikan tinggi. Dalam wacana hegemonik, universitas seperti Harvard bukan hanya penghasil lulusan cemerlang, tetapi juga pusat penyebaran ideologi, nilai-nilai, dan narasi yang membentuk tatanan dunia. Dalam konteks ini, upaya pemerintah AS untuk “mengamankan” Harvard juga mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap infiltrasi epistemik dari Tiongkok yakni masuknya pengaruh melalui penelitian, kerjasama, dan kehadiran mahasiswa asing di ruang akademik strategis (Cole, 2011).

Kebijakan ini juga menandai transisi penting dalam cara negara memperlakukan lembaga pendidikan tinggi. Jika sebelumnya universitas dianggap otonom dan netral, maka kini mereka masuk ke dalam logika politik luar negeri dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dalam dunia global saat ini, kampus bukan lagi sekadar tempat belajar, melainkan medan pertempuran baru dalam kontestasi antar negara, khususnya dalam kompetisi teknologi, sains, dan ideologi (Zakaria, 1998). Dari sisi Tiongkok, pembatasan visa ini bisa dibaca sebagai bentuk sinyal bahwa keberhasilan mereka dalam mengirimkan mahasiswa terbaik ke AS mulai dianggap ancaman. Statistik menunjukkan bahwa mahasiswa asal Tiongkok secara konsisten menjadi kelompok terbesar di Harvard dan universitas Ivy League lainnya dalam dua dekade terakhir. Mereka tidak hanya menempuh pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam penelitian, inovasi, dan publikasi. Dengan membatasi akses ini, AS secara langsung memotong jalur

penting yang selama ini menjadi saluran pengaruh akademik Tiongkok di ranah global (Institute of International Education, 2024).

Namun, langkah ini juga menuai kritik luas dari komunitas akademik. Banyak yang menilai bahwa pembatasan visa bukan hanya merugikan mahasiswa asing, tetapi juga merugikan Amerika Serikat sendiri. Kehilangan mahasiswa internasional berarti kehilangan talenta global, keragaman intelektual, dan kontribusi ekonomi yang sangat besar. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa mahasiswa asing di AS menyumbang miliaran dolar per tahun dan mendukung ratusan ribu lapangan kerja (NAFSA, 2023). Dalam gambaran besar, kontroversi Harvard dan kebijakan imigrasi 2025 mencerminkan gesekan yang semakin kuat antara keterbukaan akademik dan kepentingan nasional. Harvard, sebagai institusi simbolik, berada di garis depan dari benturan ini. Ia bukan hanya mewakili pendidikan tinggi Amerika, tetapi juga menjadi medan tarik-menarik antara prinsip kebebasan akademik dan kekhawatiran geopolitik. Dalam konteks persaingan AS dan Tiongkok, konflik ini menunjukkan bahwa kampus tidak lagi steril dari konflik negara, melainkan justru menjadi panggung utama dari pertarungan simbolik dan strategis dua kekuatan besar dunia.